



*Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur*

LKJIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



**DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL**

2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pelaporan Kinerja merupakan bagian dari rangkaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban bagi publik atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, dan visi dinas. Selanjutnya Laporan Kinerja ini juga menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberi gambaran tentang tingkat keberhasilan pencapaian sasaran/tujuan/visi dinas melalui pelaksanaan program/kegiatan, maupun kendala-kendala yang dihadapi yang menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Selanjutnya laporan ini juga menjadi bahan evaluasi guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dinas pada tahun-tahun berikutnya.

Samarinda, Februari 2022
Kepala,

CHRISTIANUS BENNY, S.HUT., M.H
NIP. 19770914 200112 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi sebagai satuan kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah telah menjalankan peran yang cukup penting dalam kemajuan pembangunan di sektor Energi dan sumber Daya Mineral, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis, dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 -2023 adalah **BERANI UNTUK KALTIM BERDAULAT**” hal tersebut, telah ditetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahun dengan target-target kinerja yang terukur.

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja Perangkat Daerah dapat dianalisis dari masing-masing capaian kinerja sasaran yang terkait dengan program/kegiatan yaitu dengan Interaktif baik melalui media ataupun elektronik yang selanjutnya sebagai feedback dalam kinerja pemerintah cukup baik, hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat yang secara aktif mengawasi serta secara langsung mengawasi program kegiatan serta berkontribusi dalam hal-hal memecahkan masalah yang timbul untuk perbaikan keberhasilan pencapaian program dan kegiatan, partisipasi masyarakat telah merespon bentuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah secara langsung dapat dipertanggungjawabkan. Respon tersebut disampaikan dalam dialog langsung kunjungan eksekutif ke lapangan ataupun via dialog.

Program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang tertuang di Dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2023, khususnya tahun 2021 terdapat 5 Program/Kegiatan, diantaranya 4 (empat) Sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil analisa 4 (empat) sasaran strategis yang memenuhi target atau dengan katagori sangat efisien. *Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis yaitu **100 %** atau dengan katagori **Sangat Efisien**.*

Jumlah Dana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dianggarkan untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan strategis dan pendukung/ administratif Tahun 2021 secara keseluruhan yaitu Realisasi Fisik sebesar **96,85**

% dan Realisasi Keuangan sebesar **82,72** % atau sebesar Rp. 62.438.548.883,- dari jumlah dana Pagu Anggaran sebesar Rp. 75.479.895.000,- .

Secara umum pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 khususnya Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Aparatur	5
E. Aspek Strategis Organisasi	8
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	11
G. Sarana dan Prasarana Kerja	17
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 19
A. Perencanaan Strategis	19
B. Indikator Kinerja Utama	26
C. Perjanjian Kinerja	29
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 31
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP	31
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	35
C. Analisis Capaian Kinerja.....	36
D. Realisasi Anggaran.....	56
 BAB IV PENUTUP	 60
1. Kesimpulan	60
2. Saran	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Sumberdaya Aparatur Dinas ESDM	5
Tabel 2.	Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Prov.Kaltim	11
Tabel 3.	Sarana dan Prasarana Kantor	18
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja	29
Tabel 5.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel 6.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas	32
Tabel 7.	Pengukuran Capaian Kinerja	36
Tabel 8.	Realisasi Anggaran	57
Tabel 9.	Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan	58

**BAB I
PENDAHULUAN****A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 03 Tahun 2001, sebagai hasil penggabungan Dinas Pertambangan Tingkat I Kalimantan Timur dengan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu mengalami beberapa kali penyempurnaan struktur dan tugas fungsi berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 08 Tahun 2018 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Pergub Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur berubah menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur terbentuk berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, dan uraian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, perubahan tersebut didasarkan dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kalimantan Timur dianugerahi beragam sumberdaya energi dan mineral dengan potensi yang cukup melimpah seperti minyak bumi, gas bumi, gas metan, batubara, dan mineral lain. Eksploitasi yang telah dilakukan sejak beberapa dekade terhadap sumberdaya alam tersebut berpengaruh sangat besar dalam peningkatan laju pembangunan di Kalimantan Timur beberapa tahun silam, karena kontribusinya yang sangat besar terhadap penerimaan keuangan daerah.

Terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi sehingga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki beban tugas yang semakin besar dalam penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan termasuk dalam bidang urusan energi dan sumberdaya mineral.

Kalimantan Timur hingga saat ini juga masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pembangunan menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik dan sumber air bersih. Dan salah satu target kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada awal periode RPJMD 2019-2023 adalah terpenuhinya kebutuhan energi daerah. Dengan demikian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai perangkat daerah mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah di bidang energi dan sumberdaya mineral dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan otonomi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan

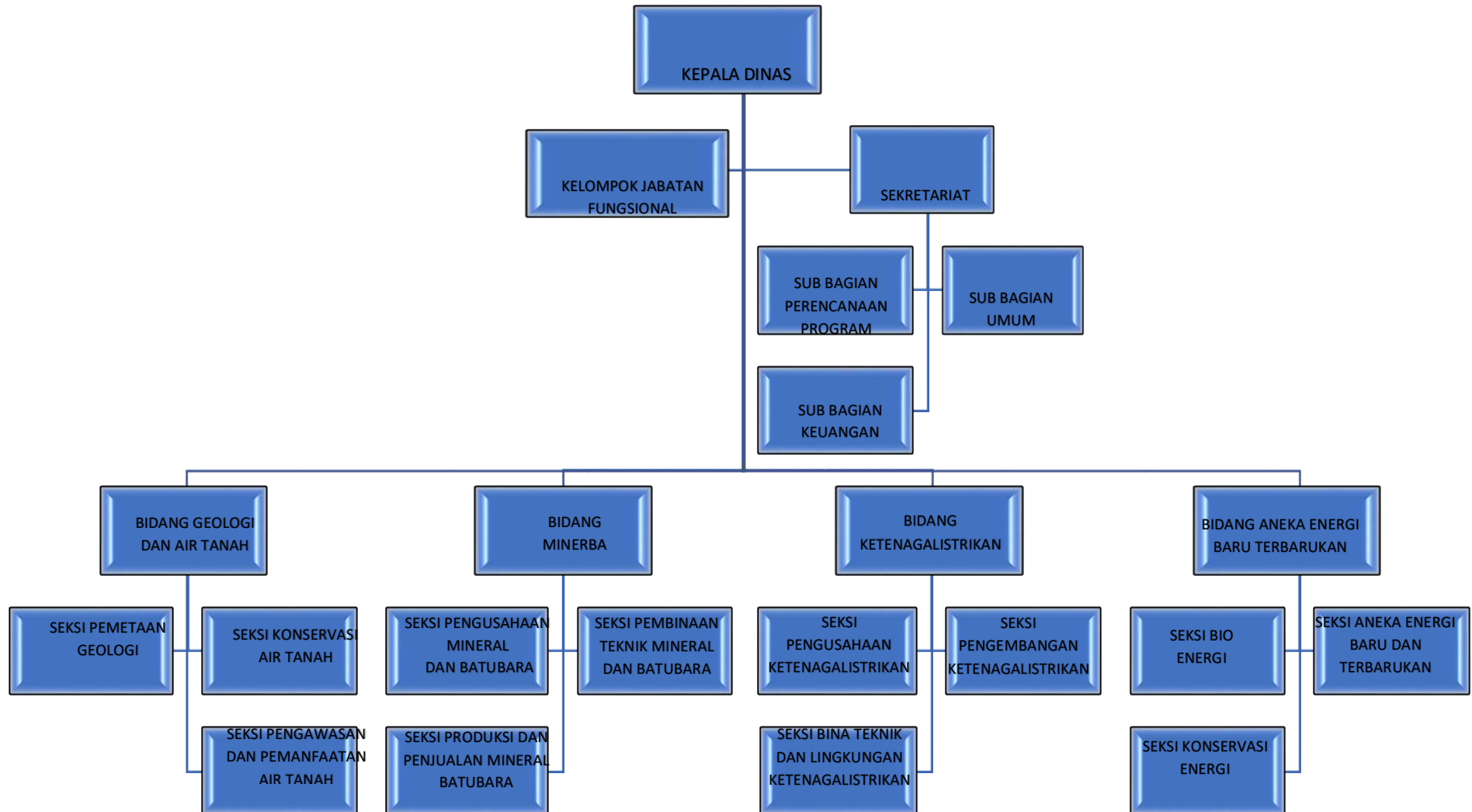
- teknis di bidang mineral dan batubara;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis geologi dan air tanah;
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang ketenagalistrikan;
 7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang energy baru terbarukan dan konservasi energi;
 8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 9. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya

C. Struktur Organisasi

Penataan struktur dan besaran organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dilakukan setelah melalui proses analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pembentukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah di bidang urusan energi dan sumberdaya mineral. Walaupun bidang urusan energi dan sumberdaya mineral merupakan urusan pilihan, namun memiliki lingkup beban kerja yang sangat luas dan kompleks.

Atas dasar pertimbangan lingkup beban kerja tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip organisasi yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dalam bagan berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



D. Sumber Daya Aparatur

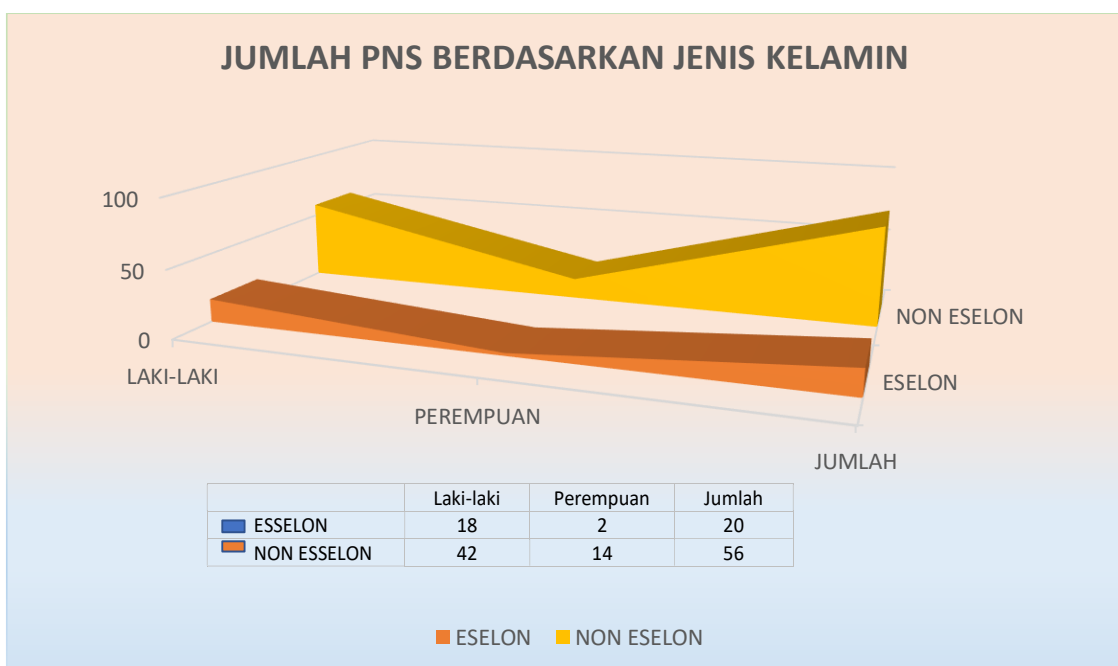
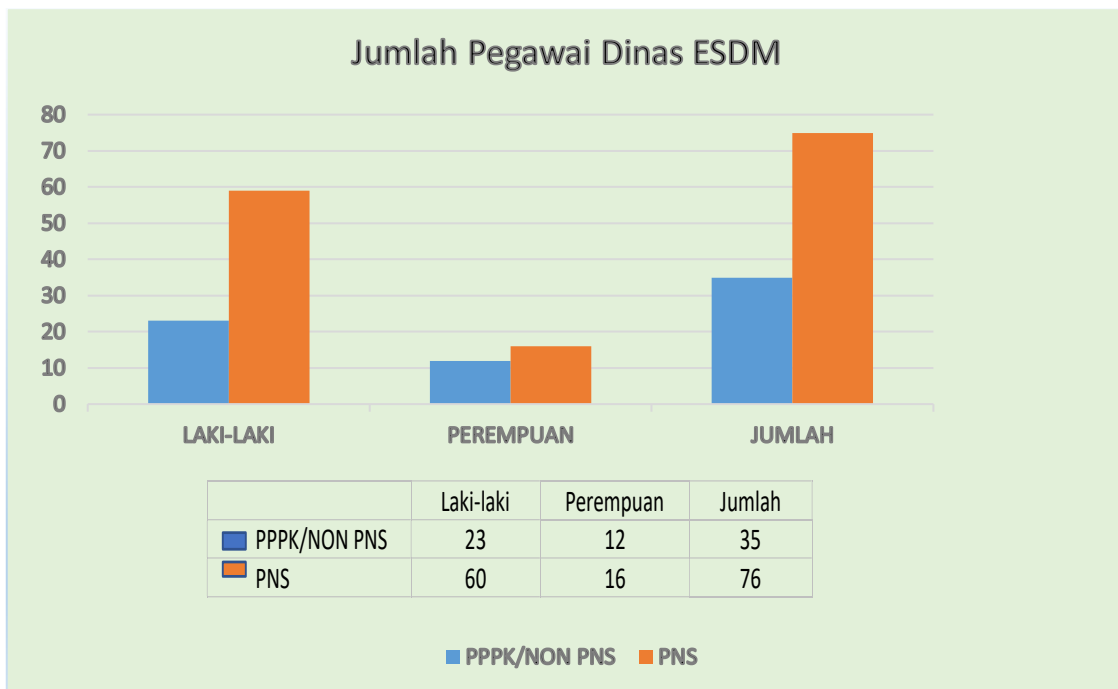
Guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan program pembangunan di bidang urusan energi dan sumberdaya mineral, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan kapabilitas, kompetensi, dan profesionalitas aparatur, seperti pengisian jabatan-jabatan fungsional tertentu baik teknis maupun non teknis, dan akan tetap dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi.

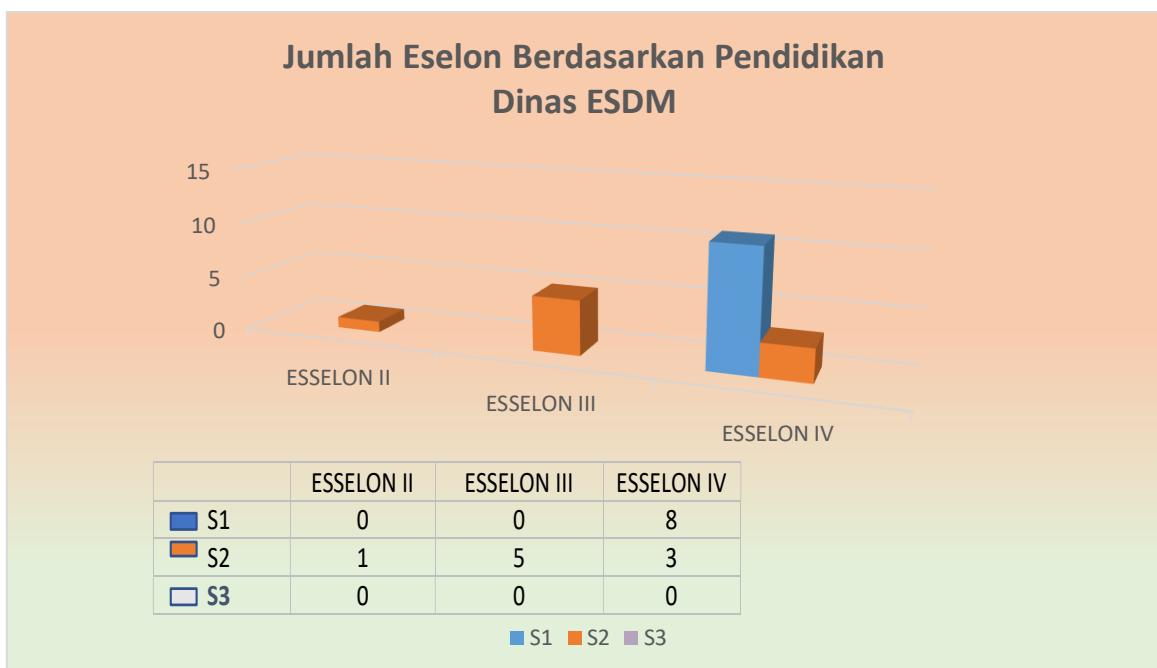
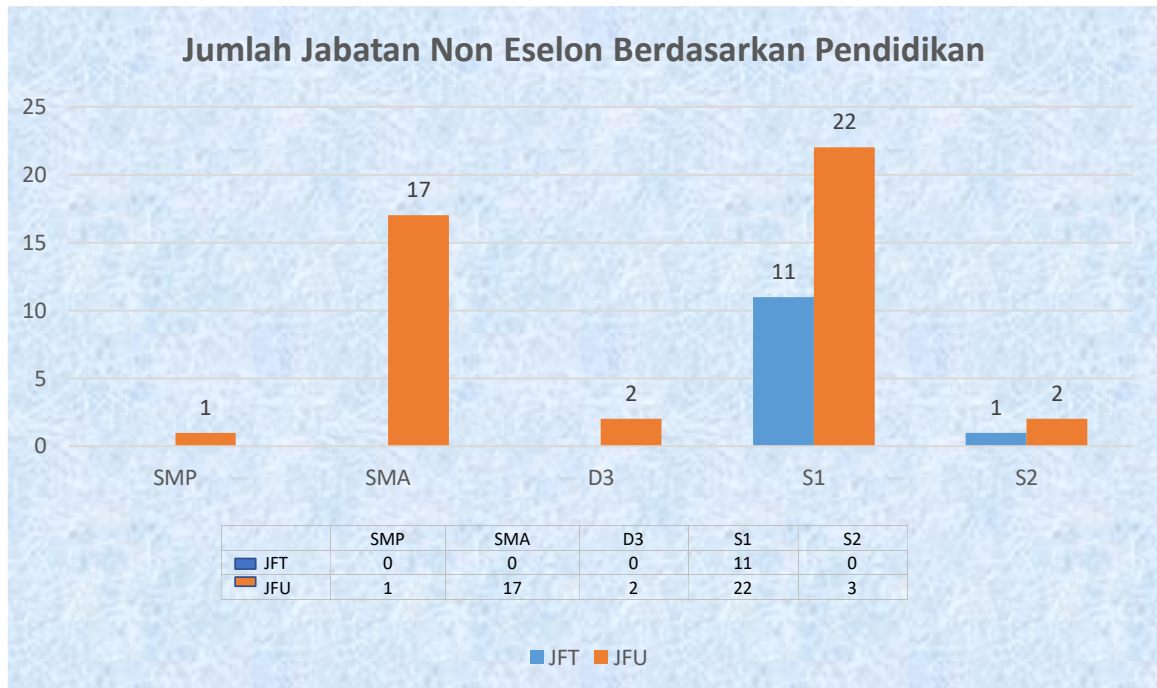
Jumlah dan komposisi aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada Tabel-1 dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLT A	SLT P	SD
Kepala Dinas	1	-	1	-			1	-				
Sekretaris	1	-	1	-			-	1				
Kasubbag	2	1	-	3			-	3				
Kepala Bidang	4	-	4	-			4	-				
Kasie	10	1	3	8			3	8				
JFT	10	1	-	11			1	10	-	-	-	-
JFU	31	12	-	28	14	1	2	21	2	17	1	-
Jumlah PNS	59	15	9	50	14	1	10	43	2	17	1	-
PPPK	23	12	-	-	-	-	2	27	1	5	-	-
Jumlah PPPK	23	12	-	-	-	-	2	27	1	5	-	-
Total	82	27	9	50	14	1	12	70	3	22	1	-

Faktor sumber daya manusia memegang peranan yang paling penting dan dominan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur berupaya secara berkesinambungan tetap menjaga peran sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas.





Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur dinas berbagai upaya telah dilakukan diantaranya dengan pengisian jabatan-jabatan fungsional baik teknis maupun non teknis. Hal ini dapat terlaksana setelah terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait penerapan jabatan fungsional pada sektor pertambangan dan energi. Pengangkatan pejabat-

pejabat fungsional akan tetap dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi.

E. Aspek Strategis Organisasi

Perencanaan kinerja jangka menengah maupun jangka pendek didasarkan pada visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tertuang dalam Renstra 2019 – 2023 , yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai pada awal Tahun 2019 serta sasaran - sasaran tahunan yang harus dicapai selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

1. Visi

Selaras dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023, untuk kurun waktu Tahun 2019 - 2023 adalah :

BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT

Ada beberapa hal yang terkandung dalam Visi Gubernur dan Wakil Gubernur dan wakil Gubernur terpilih periode 2019-2023 yang diantaranya mengandung makna :

Ada beberapa hal yang terkandung dalam pernyataan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2023 yang diantaranya mengandung makna:

- a. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang bermartabat, berkualitas dan memiliki daya saing.
- b. Kalimantan Timur mampu mengelola seluruh sumber daya alamnya dengan prinsip 'keberpihakan' untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berwawasan lingkungan.
- c. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan, swasembada pangan dan kecukupan sandang dan papan.
- d. Kalimantan Timur mampu berintegritas dalam pemerintahan, hukum dan keadilan sosial demi terciptanya kedamaian dan ketertiban umum.

- a. Integritas dipahami sebagai moral tertinggi dan juga difahami sebagai kesesuaian antara tutur kata dan tindakan yaitu pemerintahan yang bersih dan terbuka sehingga menimbulkan 'trust' di masyarakat.
- b. Kalimantan Timur mampu menjamin pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan energi. Lambatnya kemajuan dan kesejahteraan di daerah disebabkan persoalan infrastruktur yang tidak memadai. Pemenuhan infrastruktur tercantum di dalam poin ini menegaskan

Bahwa apabila menghendaki perubahan, pemenuhan infrastruktur adalah cara yang sangat efektif menuju kemajuan dan perubahan untuk masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, **BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR YANG BERDAULAT**

tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi seperti berikut :

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
3. Berdaulat dalam memenuhi infrastruktur kewilayahan
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Secara garis besar penjelasan misi-misi pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagai berikut :

- a. Misi Berdaulat Pertama: Pembangunan sumber daya manusia Kaltim yang bermartabat dengan Penerapan pendidikan agama dan moral dalam sistem pendidikan yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi menuju masyarakat Kalimantan Timur

yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing, Perbedayaan perempuan dan pemuda serta peningkatan prestasi olah raga dan seni budaya Kalimantan Timur.

- b. Misi Berdaulat Kedua: Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberian modal usaha dan bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah yang mandiri dan padat karya serta pengembangan wisata.
- c. Misi Berdaulat Ketiga : Pemerataan pembangunan insfrastruktur ekonomi dan kewilayahan di seluruh Kalimantan Timur dengan pengembangan dan pembangunan sumber energi baru dan ketersediaan energi yang murah dan cukup bagi masyarakat.
- d. Misi Berdaulat Keempat: Pengelolaan dan Lindung Lingkungan pada setiap sektor
- e. Misi Berdaulat Kelima: Mewujudkan birokrasi pemerintahan bersih dan profesional dalam melayani masyarakat Kalimantan Timur menuju kesejahteraan secara adil dan merata.

Peran penting Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visi dimaksud dengan melaksanakan penerapan regulasi pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, pengelolaan dan penyelamatan lingkungan pertambangan, percepatan pemerataan pembangunan insfrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan dan pembangunan sumber energi baru dan ketersediaan energi yang murah dan cukup bagi masyarakat.

Selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung mendukung dan berkontribusi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Gubernur/Wakil
Gubernur Yang Terkait Dengan Tugas dan Fungsi PD

VISI : *Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat*

No.	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program PD
1.	BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN (MISI-3)	MENINGKATKAN PEMERATAAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR (Indeks Gini) TUJUAN-4	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MENUNJANG PEREKONOMIAN BERBASIS TATA RUANG/KEWILAYAHAN (SASARAN-14)	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)	1. PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 2. PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Berdasarkan hasil analisis di berbagai aspek Permasalahan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyelenggaraan urusan pemerintah energi dalam perencanaan pembangunan sector energy dan sumber daya mineral. Isu isu strategis tersebut penting untuk diperhatikan karena diprediksi akan menciptakan peluang atau ancaman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bidang Geologi dan Air Tanah

Isu strategis bidang ini adalah masih banyak wilayah rawan bencana yang belum terpetakan, Secara geografis sebagian wilayah di Kalimantan Timur rawan terhadap bencana geologi, seperti tanah longsor, banjir bandang dan potensi tsunami. Kegiatan penatagunaan lahan dan penyusunan tata ruang wilayah di Provinsi Kalimantan Timur belum memperhatikan kondisi kegeologian dan kemampuan lahan sehingga dalam pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan kondisi geologi daerahnya.

Di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdapat banyak situs geologi yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana ilmu pengetahuan dan pembelajaran, sampai saat ini belum dilakukan inventarisasi dan perlindungan, sehingga banyak mengalami kerusakan seperti pada Delta Mahakam dan kawasan pengunungan kars yang terbentang hampir di beberapa Kabupaten dan Kota. Kawasan yang ditempati batuan karbonat seringkali berkembang dan membentuk bentang alam karst, yang memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air yang menyimpan nilai ilmiah, dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Isu strategis Air Tanah adalah belum optimalnya pengelolaan air tanah dalam arti luas, yaitu pengelolaan air tanah yang berbasis CAT yang mencakup kegiatan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta konservasi air tanah. Strategi pengelolaan air tanah berbasis CAT tersebut didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan/pemanfaatan air tanah.

Salah satu perangkat penting dalam pengelolaan air tanah berbasis CAT adalah zona konservasi air tanah. Perencanaan pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan, hingga pemberian izin pengambilan air tanah dilakukan dengan mengacu pada zona konservasi air tanah. Namun hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum menetapkan zona konservasi air tanah pada wilayah-wilayah CAT yang ada. Beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kota Balikpapan dan Kota Bontang, menjadikan air tanah sebagai sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, baik untuk keperluan industri maupun keperluan domestik/ rumah tangga sehingga intensitas pengambilan air tanah di daerah tersebut tergolong cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Apabila pengambilan air tanah dilakukan secara berlebihan atau tidak terkendali, akan dapat menimbulkan kerusakan baik kuantitas, kualitas, maupun lingkungan air tanah, seperti terjadinya intrusi air laut, amblesan tanah, atau penurunan muka air tanah, yang pemulihannya membutuhkan waktu yang lama, biaya tinggi, dan teknologi yang kompleks, bahkan

mungkin tidak dapat dipulihkan kembali seperti keadaan semula.

Dengan ditetapkannya zona konservasi air tanah berbasis CAT, akan memudahkan dalam pembinaan dan pengawasan, dan kegiatan pengambilan air tanah dapat dilakukan secara terencana sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.

Isu strategis sektor minyak dan gas bumi adalah :

1. Saat ini sudah ada 6 (enam) penawaran PI 10% kepada Gubernur Kalimantan Timur, yaitu WK Mahakam, WK Bontang, WK Rapak, WK Ganal, WK Pasir, dan WK Wain, bahkan Gubernur sudah menyerahkan urusan PI ke Perusda MMP Kaltim (Surat balasan Gubernur ke SKK Migas) dan sampai saat ini Kalimantan Timur belum bisa masuk di PI 10% yang sudah ditawarkan karena administrasi Perusda di Daerah (baik Provinsi maupun Kab/Kota).
2. Terdapat Wilayah Kerja Migas di Kalimantan Timur yang memasuki tahap POD I (Plan of Development I) dimana WK Migas tersebut akan beralih status dari Eksplorasi ke Eksploitasi, yaitu : 1). WK Bontang (Salamander Energy) di Kutai Timur, 2). WK Pasir (Pasir Petroleum Resourcer) di Paser, 3). WK Rapak (Chevron) di atas 12 mil selat makassar, 4). WK Ganal (Chevron) di atas 12 mil selat makassar, 5). WK Wain (Pandawa Prima Lestari) di Penajam, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, Daerah mempunyai kesempatan mendapat PI 10% terhadap Wilayah Kerja POD I (peningkatan status dari eksplorasi ke eksploitasi).
3. Terdapat 4 (empat) Wilayah Kerja (Blok) yang dialihkan ke Pertamina Hulu Energi, yaitu : 1). Blok Mahakam (mulai 1 Januari 2018 dialih kelola Pertamina Hulu Mahakam dari Total EP Indonesie); 2). Blok Sangasanga (7 Agst 2018 dialih kelola dari VICO Indonesia ke Pertamina Hulu SangaSanga); 3). Blok East Kalimantan (pada 24 Oktober 2018 Dialihkan dari Chevron Indonesia ke Pertamina Hulu Kalimantan Timur); 4). Blok Attaka (mulai Oktober dialihkelola dari Chevron Indonesia ke Pertamina Hulu Attaka, Berdasarkan Permen

ESDM nomor 37 Tahun 2016, Daerah mendapat porsi Participating Interest Blok yang habis kontrak dan diproduksi oleh Operator yang baru, sebesar maksimal 10% dimana modal yang diperlukan ditalangi oleh operator dalam hal ini Operator Blok. Pengembalian diambil dari hasil keuntungan dan tanpa bunga.

4. Percepatan peningkatan produksi Minyak Bumi sebesar 1,01 juta BOPD sesuai Inpres No. 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional, Percepatan peningkatan produksi Gas Bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Kalimantan Timur, Kelangkaan BBM

bersubsidi di wilayah Kepulauan dan daerah terpencil/perbatasan serta Distribusi LPG 3 Kg masih belum tepat sasaran dan tepat harga. Dalam hal ketersediaan energi, penambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan energi terutama minyak dan gas bumi. Kebutuhan energi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan energi, dikarenakan cadangan energi utamanya energi (bahan bakar) fosil cadangannya semakin kecil yang pada akhirnya akan dihadapkan pada masalah kerentanan energi yang berpotensi terhadap terjadinya krisis energi. Hal ini merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu proses pembangunan di Kalimantan Timur. Kewenangan daerah termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah bagaimana mengendalikan distribusi BBM agar tepat sasaran untuk mendukung usaha masyarakat utamanya Usaha Kecil dan menengah (UKM) dan pasokan ke fasilitas vital seperti pembangkit listrik. Kelangkaan BBM bersubsidi biasanya dipicu gangguan distribusi, adanya spekulasi dan tingginya permintaan BBM yang berdampak pada gangguan perekonomian dan distribusi barang/jasa

2. Bidang Mineral dan Batubara

Isu strategis bidang mineral dan batubara adalah:

1. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi sehingga meningkat pula konsumsi bahan tambang sebagai material

dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jalan tol, jembatan, bangunan, perumahan dan lain-lain, sementara masih banyak komoditas dari hasil pertambangan yang dijual dalam bentuk raw material. Disamping itu masih juga terdapat kegiatan pertambangan tanpa ijin yang marak di setiap Kabupaten dan Kota yang berkedok pada pemanfaatan/pematangan lahan untuk kepentingan tanah kavling dan lainnya.

2. Maraknya kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) komoditas batubara dan batu an yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi penerimaan dari sektor mineral dan batubara.
3. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB dan banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan ke giatan usaha sektor lain.
4. Timbulnya implikasi hukum akibat penataan perijinan yang diserahkan ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diterbitkan Kabupaten/Kota.

Aktifitas pertambangan dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan daerah selama bertahun-tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka (open pit) dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu penambangan batu bara juga bisa mengakibatkan perubahan social ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu sehingga dapat mengurangi pencemaran akibat aktivitas

pertambangan batubara dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi di sekitar pertambangan. Deforestasi dan degradasi hutan akibat proses pertambangan memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan iklim global, karena perubahan penggunaan lahan hutan menjadi bukan hutan menyebabkan vegetasi hutan yang menyerap emisi CO₂ di udara semakin berkurang. Deforestasi dan degradasi hutan di kawasan pertambangan umumnya terjadi karena pembukaan lahan yang tidak diimbangi dengan kegiatan reklamasi dan revegetasi bahkan cenderung ditinggalkan terbuka begitu saja yang menyebabkan berubahnya fungsi hutan., penataan perijinan dengan melakukan evaluasi keseluruhan adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurangi tingginya perubahan iklim global.

3. Bidang Ketenagalistrikan

Belum tertatanya sistem dan manajemen penyediaan listrik di Kalimantan Timur, Belum meratanya jaringan listrik antar wilayah yang dapat menjangkau daerah perdesaan, pedalaman dan perbatasan, Belum optimalnya pemanfaatan batubara dan sumber energi lainnya sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik, Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik. Cakupan pelayanan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat. Pada Tahun 2021 rasio elektrifikasi rumah tangga mengalami peningkatan mencapai menjadi 91,98 %. Namun demikian tingkat elektrifikasi perdesaan telah mencapai 100%. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain pembangunan pembangkit listrik oleh swasta dan PT. PLN (Persero) dan pengembangan sumber energi terbarukan. Sedangkan meningkatnya pemanfaatan POME dikarenakan mempunyai prospek yang baik sebagai energi alternatif untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat.

4. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Isu Strategis dalam bidang pemanfaatan energi baru terbarukan adalah biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi, daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, harga jual beli energi baru terbarukan secara ekonomi kurang menarik serta terbatasnya sarana infrastruktur pendukung di lokasi tersebut. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam membangun infrastruktur dimaksud, melalui program dan pendanaan yang memadai.

Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid yang sudah terbangun sebanyak 45 Unit dengan total kapasitas pembangkit sebesar 1.963 KWp dengan menggunakan baterai kering VRLA yang pada umumnya umur ekonomis baterai hanya 5 tahun. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam monitoring dan revitalisasi PLTS Terpusat tersebut.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, baik berupa barang, modal bergerak maupun tidak bergerak, sangat berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini memiliki 3 gedung kantor yang terdiri dari 1 gedung utama dan 2 gedung tambahan, dilengkapi dengan sarana perlengkapan dan peralatan gedung kantor.

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Kantor

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	4.892	M ²
2	Gedung		
	- Gedung Utama	3 1.530.72	unit (3 lantai) M ²
	- Gedung Bidang Geologi dan Air Tanah	2 665.12	unit (2 lantai) M ²
	- Gedung Bidang Minerba	3 532.8	unit (3 lantai) M ²
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	3	Line (1 fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	3	Ruangan
8	Ruang Arsip	1	Ruangan
9	Pos SATPAM	1	Buah
10	Musholla	1	Buah
11	Koperasi	0	Buah
12	Taman Dalam	1	Area
13	Taman Luar	1	Area

BAB II
PERENCANAAN KINERJA**A. Perencanaan Strategis**

Penetapan perencanaan strategi merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi, Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya permasalahan utama yang dihadapi pada sektor energi dan sumberdaya mineral, potensi pengembangan dalam kurun waktu 5 tahun, serta sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah.

1. Tujuan

Salah satu komponen dan perencanaan strategi tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta upaya mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah. Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada Renstra Tahun 2019 - 2023 yaitu:

**“ MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN PELAYANAN
INFRASTRUKTUR DASAR YANG MENUNJANG PEREKONOMIAN
BERBASIS TATA RUANG/KEWILAYAHAN”**

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2019-2023 yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan visi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merumuskan Sasaran-sasaran yang ditetapkan selama Tahun (Tahun 2019 - 2023) adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan
2. Meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik
3. Terpenuhinya kebutuhan energi terpencil

Sasaran pendukung yang tidak berkaitan secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan visi Perangkat Daerah adalah :

- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi perkantoran

Sebagaimana pembagian bidang urusan pemerintahan daerah bahwa urusan energi dan sumberdaya mineral merupakan urusan yang bersifat *pilihan*, sehingga tidak memiliki standar pelayanan minimal (SPM) untuk digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral. Oleh karena itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan indikator kinerja yang telah disepakati secara internal.

Indikator kinerja yang digunakan mengacu pada sasaran strategis organisasi sebagaimana telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023. Indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengacu pada sasaran yang ingin dicapai.

3. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah dalam Wilayah Provinsi
2. Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan batubara
3. Melakukan klarifikasi izin usaha pertambangan batu bara terhadap laporan instansi terkait
4. Peningkatan Rasio Elektrifikasi
5. Terpenuhinya kebutuhan energi di daerah terpencil

6. Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Program dan Kegiatan

Dari Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

- Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
- Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
- Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama
- Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dilakukan dalam 1 (satu) daerah Provinsi

4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

- Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan
- Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 Ton Per Tahun
- Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

- Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
- Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
- Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
- Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri
- Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BERDASARKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

VISI GUBERNUR : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR YANG BERDAULAT										
MISI 3 GUBERNUR : BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN										
Tujuan 4 GUBERNUR : MENINGKATKAN PEMERATAAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR										
SASARAN 14 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MENUNJANG PEREKONOMIAN BERBASIS TATA RUANG/KEWILAYAHAN										
TUJUAN				Indikator Kinerja	Satuan	RENJA 2019	RENJA 2020	RENJA 2021	RENJA 2022	RENJA 2023
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MENUNJANG PEREKONOMIAN BERBASIS TATA RUANG/KEWILAYAHAN				Ratio Elektrifikasi (%)	(%)	85,50	87,50	91,50	93,00	95,00
No	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	%	RENJA 2019	RENJA 2020	RENJA 2021	RENJA 2022	RENJA 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Pemetaan zona konservasi air tanah dalam wilayah provinsi	1. Inventarisasi potensi air tanah 2. Pendataan jumlah pengambilan air tanah	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	%	-	-	2,00	2,00	2,00
		Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan batubara	a. Melakukan evaluasi di wilayah izin usaha pertambangan terhadap kegiatan yang dilakukan. b. Melakukan pendataan dan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang. c. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pertambangan terhadap produksi dan penjualan.	Persentase jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi.	%	38,86	42,75	46,63	54,40	59,59
		Melakukan klarifikasi izin usaha pertambangan batubara terhadap laporan instansi terkait	1. Memfasilitasi penegakan pencabutan ijin pertambangan Non-CnC (non-clear and non clean) 2. Keputusan Gubernur mengenai pencabutan ijin pertambangan							
2.	Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik	Peningkatan Rasio Elektrifikasi	1. Pemerataan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik untuk daerah/desa yang belum terjangkau PLN. 2. Penyediaan pembiayaan pemasangan instalasi dan penyambungan listrik PLN untuk masyarakat tidak mampu. 3. Pembinaan dan kerjasama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Persentase Rasio Elektrifikasi	%	85,50	87,50	91,50	93,00	95,00
3.	Terpenuhinya kebutuhan Energi di daerah terpencil	Terpenuhinya kebutuhan energi di daerah terpencil	- Inventarisasi potensi EBT - Pembangunan infrastruktur EBT Pembinaan EBT	Rasio Desa Berlistrik	%	99,00	99,13	99,33	99,51	100,00
4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mlneral	Pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	-	-	82	83	84

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019-2023**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE 1-5				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Konektivitas dan Pelayanan Infrastruktur Dasar yang Menunjang Perekonomian Berbasis Tata Ruang/Kewilayahan	Rasio Elektrifikasi	%	85,50	87,50	91,50	93,00	95,00
1. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	%	-	-	2,00	2,00	2,00
	- Persentase Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi	%	38,86	42,75	46,63	54,40	59,59
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik	- Persentase Rasio Elektrifikasi	%	85,50	87,50	91,50	93,00	95,00
3. Terpenuhi kebutuhan Energi di daerah terpencil	- Rasio Desa Berlistrik	%	99,00	99,13	99,33	99,51	100
4. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	- Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	-	-	82	83	84

B. Indikator Kinerja Utama

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2021**

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jabatan : Kepala Dinas

Tugas :

1. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian administrasi kesekretariatan, Mineral dan Batubara, Geologi dan Air Tanah, Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi berdasarkan Renstra agar terwujud keterpaduan dan keserasian kerja
2. Menyusun Pedoman kerja berdasarkan rencana kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan program kerja;
3. Mendistribusikan tugas kepada sekretariat dan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas agar kegiatan berjalan sesuai dengan program masing-masing bagian
4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Geologi dan Air Tanah, Mineral dan Batubara, Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi berdasarkan program kegiatan untuk terwujudnya keterpaduan dan keserasian kerja
5. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di Kesekretariatan, Mineral dan Batubara, Geologi dan Air Tanah, Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran
6. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknik bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas;
7. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
9. Mengedalikan pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional Dinas dengan cara membimbing, mengarahkan dan mengawasi bawahan untuk kelancaran tugas Dinas
10. Melakukan pembinaan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan sesuai dengan peraturan dan pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai
11. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasi agar program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya tercapai
12. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program berdasarkan realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan
13. Melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi : Membantu Gubernur melaksanakan urusan yang menjadi wewenang daerah di bidang energi dan sumber daya mineral

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Tewujudnya Pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	$n = \frac{\text{Jumlah Debit Pengambilan Air tanah}}{\text{Jumlah Air yang diserap ke Seluruh CAT}} \times 100$	Hasil Survey, Pemetaan, Evaluasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim
		Persentase Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi	$n = \frac{\text{Jumlah perusahaan berproduksi}}{\text{Jumlah IUP operasi Produksi}} \times 100$	Perusahaan, IUP OP	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim
2.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase Rasio Elektrifikasi	$n = \frac{\text{Jumlah KK Berlistrik}}{\text{Jumlah KK}} \times 100$	PT.PLN.Dinas Kependudukan/Capil di seluruh Prov.Kaltim,	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim
3.	Terpernuhinya Kebutuhan Energi di daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	$n = \frac{\text{Jumlah Desa Berlistrik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	PT.PLN.Dinas Kependudukan/Capil di seluruh Prov.Kaltim,	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim
4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	$n = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Penerima layanan/masyarakat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses perencanaan jangka menengah sebagaimana diuraikan di atas. Indikator dan target kinerja yang ditetapkan mengacu pada sasaran strategis, yang telah direncanakan untuk dicapai setiap tahun.

Target kinerja pada Tabel-4 merupakan target kinerja yang perjanjian oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur, yang dituangkan didalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Tabel 4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No,	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berkelanjutan	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Persentase	2,00
		- Persentase jumlah Perusahaan yang melaksanakan kegiatan produksi	Persentase	46,63
2	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase Rasio Elektrifikasi	Persentase	91,50
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	Persentase	99,33
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	82

A. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim Tahun 2021 melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.479.895.000,-

Secara keseluruhan realisasi fisik sebesar 96,85% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.446.288.883,- atau sebesar 82,72% dengan sisa dana sebesar Rp. 13.041.346.117,-

B. Target Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Wajib Mengikat	22,164,685,402,-	18.791.116.082,-	84,78
2.	Belanja Tupoksional	4,174,999,960,-	2.742.678.602,-	65,69
3.	Belanja Prioritas	49,140,209,638,-	40.904.754.199,-	83,24
	Jumlah	75,479,895,000,-	62.438.548.883,-	82,72

C. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berkelanjutan	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1.949.999.960,-	Bidang Geologi dan Air Tanah
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	2.225.000.000,-	Bidang Mineral dan Batubara
2.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	46.921.080.638,-	Bidang Ketenagalistrikan
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	2.219.129.000,-	Bidang EBTKE
4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.164.685.402,-	Sekretariat

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**A. Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan timur telah melaksanakan penilaian kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan permen PAN-RB No.12 tahun 2015, maka pada bab ini akan dilakukan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tahun 2019 adalah merupakan tahun I dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sehingga analisis terdapat poin2 membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan mengacu pada Pemendagri 54 tahun 2010 yaitu :

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Kriteria
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Keterangan : berdasarkan Permedagri No.54 taun 2010

Hasil atas implentasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada tahun 2020 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami peningkatan dengan nilai 70,09 hal tersebut dikatogorikan dengan predikat BB dengan interprestasi (Sangat Baik) dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 68,35 yang mempunyai interprestasi Akuntabitas kinerja sudah baik, capaian hasil evaluasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kaimantan timur dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilias kinerja

Tabel 6
Hasil Evalusi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,17	24,17
2	Pengukuran Kinerja	25%	15,31	15,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,60	10,97
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,77	5,83
5	Capaian Kinerja	20%	12,50	14,13
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	68,35	70,09
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Baik	Sangat Baik

2. Tindak lanjut atas Evaluasi Inspektorat Provinsi Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implentasi Sistem AKIP

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Kalimantan Timur telah melakukan perbaikan terhadap laporan evaluasi program/kegiatan sebagai berikut :

Rekomendasi	Tindak lanjut	Rencana Aksi
a. Perencanaan Kinerja		
1. Melakukan perbaikan target jangka menengah dalam Renstra dan mereview dokumen secara berkala	Dokumen Renstra telah memuat Tujuan dan sasaran dan akan dilakukan perbaikan dan mereview dokumen secara berkala	Sedang melakukan persiapan penyusunan perbaikan renstra dan mereview baik melalui program/ kegiatan dan target yang dilakukan sampai dengan tahun berjalan
2. Merevisi dan memperbaiki rencana aksi atas kinerja yang harus dimonitor pencapaiannya secara berkala	Melakukan perbaikan Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja, telah mencantumkan sub kegiatan/komponen setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja	Telah dilakukan tindakan nyata atas Rencana aksi sudah dilaksanakan baik dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan pada pelaporan atau dokumentasi
b. Pengukuran Kinerja		
1. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang	Dinas ESDM telah melakukan perbaikan atas pengukuran kinerja secara berjenjang	Sudah sepenuhnya di monitor dan melakukan perbaikan secara signifikan

2. Terdapat ukuran indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan perbaikan IKU agar dapat mengukur kinerja	Akan melakukan perbaikan indikator kinerja individu agar sesuai dan menjadi ukuran kinerja Dinas ESDM
c. Pelaporan Kinerja		
1. Pelaporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya 2. Informasi kinerja dalam pelaporan kinerja belum sepenuhnya	Sudah melakukan perbaikan data pelaporan kinerja secara berkala	evaluasi atas perbandingan data kinerja dengan menyajikan perbandingan data yang akurat
3. Informasi yang disajikan agar digunakan dalam perbaikan perencanaan dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	Berdasarkan hasil Rapat Evaluasi rencana aksi memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dan digunakan untuk perbaikan kinerja setiap periode	Akan dilakukan perbaikan atas capaian kinerja eselon III dan IV agar dapat terpantau, melalui evaluasi per triwulan dan dilengkapi dengan bukti yang dapat diandalkan
d. Evaluasi Internal		
1. Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	Sudah dilakukan evaluasi program mengenai kemajuan pencapaian kinerja	Telah melakukan komunikasi terhadap pihak dalam pencapaian program kegiatan

2. Pemantauan rencana aksi agar dapat memberikan alternatif perbaikan di setiap periode	Berdasarkan hasil evaluasi telah melakukan perbaikan kinerja sesuai nota dinas yang disetujui oleh kepala dinas untuk diberikan pada masing2 bidang untuk dilakukan evaluasi kinerja	Akan melakukan evaluasi rencana aksi pertriwulan di internal Dinas ESDM
e. Pencapaian Kinerja		
1. Pencapaian sasaran kinerja output maupun outcome agar lebih ditingkatkan	Telah dilakukan evaluasi pencapaian kinerja output dan outcome secara signifikan	Sudah sepenuhnya dilakukan monitor atas pencapaian kinerja secara periodik
2. Capaian Kinerja agar lebih ditingkatkan sebelumnya	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim dalam pencapaiannya terus melakukan perbaikan kinerja sehingga capaian kinerja diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya dalam meningkatkan capaian kinerja.	Akan terus meningkatkan kinerja dengan mendorong sumberdaya internal agar dapat berdaya maksimal

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat, dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021 dalam pelaksanaannya terdapat 4 (empat)

Sasaran strategis dalam pencapaian sasaran SKPD sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 7
Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Triwulan	Target	Realisasi	%
1. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	%	2,00	Triwulan I	-	-	-
				Triwulan II	0,25	0,30	120%
				Triwulan III	0,70	0,80	114%
				Triwulan IV	1,05	1,07	101%
	Persentase Jumlah Perusahaan yang telah melakukan kegiatan Produksi	%	46,63	Triwulan I	10,00	11,12	111 %
				Triwulan II	10,20	11,00	107 %
				Triwulan III	12,35	12,45	100,8%
				Triwulan IV	14,08	15,43	109 %
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik	Persentase Rasio elektrifikasi	%	91,50	Triwulan I	21,00	21,18	100,8%
				Triwulan II	22,35	22,35	100%
				Triwulan III	23,00	23,10	100,4%
				Triwulan IV	25,15	25,35	100,7%
3. Terpenuhinya Kebutuhan Energi Di Daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	%	99,33	Triwulan I	24,00	24,00	100%
				Triwulan II	24,00	24,20	100,8%
				Triwulan III	24,10	24,40	101%
				Triwulan IV	27,23	27,40	100,6%
4. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	82	Triwulan I	-	-	-
				Triwulan II	-	-	-
				Triwulan III	-	-	-
				Triwulan IV	82	82	100%

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja adalah hasil – hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi pelaksanaannya dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal – hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang dicapai,

serta kemajuan-kemajuan yang dialami dan kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran, strategis, indikator.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Perubahan Indikator Program Pendukung RPJMD untuk Tahun 2021 s/d 2023 yaitu:

SEMULA:

NO.	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET		
			2021	2022	2023
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Persentase Perusahaan yang mengikuti Kaidah Perhitungan Sumberdaya dan Cadangan	74 %	74 %	74 %
2.	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB (Perusahaan)	50 %	55 %	60 %

MENJADI:

NO.	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET		
			2021	2022	2023
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang terpetakan	33,00 %	33,64 %	38,38 %
2.	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.	35 %	50 %	50 %

ALASAN PERUBAHAN:

NO.	PROGRAM	PENJELASAN PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Sekarang ini Dinas ESDM selaku Perangkat Daerah Provinsi sudah tidak dapat melakukan evaluasi kinerja perusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam melakukan perhitungan sumberdaya dan cadangan, berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Pemerintah Provinsi sudah tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut).
2.	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana mulai tanggal 11 Desember 2020 urusan terkait kegiatan Mineral dan Batubara dialihkan ke Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM RI). Saat ini Pemerintah Provinsi masih menunggu Perpres Pendelegasian kewenangan.

Secara umum pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Gubernur

Kalimantan Timur, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

❖ **Sasaran 1 :**

Terwujudnya Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

1. Membandingkan Antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Pengukuran Prosentase Pemanfaatan Sumber Daya secara berkelanjutan dengan hasil analisis capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Persentase	2,00	2,17	108,5%
	- Persentase jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	Persentase	46,63	50,00	107,2%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja (Lama)	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Kinerja (naik/turun)
1.	- Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara	Milyar Ton	-	61,70	62,91	-	
	- Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor pertambangan	Juta Ton Co2eq	-	1,52	2,25	-	

No.	Indikator Kinerja (Baru)	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Kinerja (naik/turun)
1.	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Persentase	-	-	-	2,17	
	- Persentase jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	Persentase	-	-	-	50,00	

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2023)	Realisasi s/d 2021	Capaian s/d 2021(%)
1.	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Persentase	2,00	2,17	105%
	- Persentase jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	Persentase	59,59	50,00	83 %

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Analisis penyebab keberhasilan kinerja di sasaran 1 (satu) yaitu Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan yang mempunyai dua indikator yaitu :

1. Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah

Berdasarkan Hasil pengukuran indikator pertama yaitu Persentase Pemanfaatan Air Tanah untuk Tahun 2021 pencapaian target yang telah ditetapkan sebesar 2,00 % naik menjadi 2,17% hal tersebut disebabkan oleh :

❖ Keberhasilan

- Adanya Penambahan Penggunaan Air Tanah
- Meningkatnya pemberian Rekomendasi Izin Air Tanah

❖ Alternatif Solusi

- Diperlukan upaya pemanfaatan dan pelestarian air tanah melalui pendayagunaan air tanah sehingga pemanfaatan air tanah dapat dilakukan secara bijaksana sesuai potensi ketersediaannya
- Mendorong peran pengguna air tanah khususnya sektor industri dan perhotelan serta yayasan konservasi lebih berkontribusi dalam perlindungan kawasan konservasi air tanah

2. Persentase Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Kegiatan Produksi

Berdasarkan hasil capaian pengukuran indikator kedua yaitu Persentase Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Kegiatan Produksi untuk tahun 2021 telah mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut disebabkan oleh:

❖ Keberhasilan

- Meningkatnya Kebutuhan dan harga batubara pada tahun 2021

❖ Alternatif Solusi

- Perlunya menjamin pengusaha dalam rangka investasi di sektor mineral dan batubara guna meningkatkan pendapatan daerah dari dana bagi hasil produksi batubara.
- Agar produksi batubara di manfaatkan dengan tetap memperhatikan lingkungan

5. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tujuan dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya

adalah untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian masing-masing sasaran sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021

Analisis efesiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efesiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efesiensi yang sesungguhnya, pengukuran efesiensi yang sesungguhnya adalah dengan memandangkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efesiensi.

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efesiensi (%)
<i>Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan</i>	- Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	108,5	73,36	70,34
	- Persentase jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	107,2	59,32	55,33

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 1 (satu) yaitu program Pengelolaan Aspek Kegeologian dengan 3 (tiga) kegiatan, dapat dilihat seperti tabel berikut ini :

1. Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah

Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021
Program Pengelolaan Aspek Gegeologian	Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang Terpetakan	33%	27,50%
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah zona konservasi air tanah yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen
Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	100 Perusahaan	122 Perusahaan
Penetapan Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah aturan terkait nilai perolehan air tanah	1 SK	0 SK

2. Persentase Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Kegiatan Produksi

Program/kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja di Indikator kedua adalah Persentase Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Kegiatan Produksi dapat dilihat sebagai berikut

Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	35%	35%
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 WIUP	1 WIUP
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3 Dokumen	3 Dokumen

Usaha Pertambangan daerah yang Berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Surat Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan	3 Dokumen	3 Dokumen
Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4 Dokumen	3 Dokumen
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengelolaan dan Pemurnian	20 perusahaan	20 Perusahaan
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batubara	Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	10 kab/kota	8 Kab/kota
Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka PMDN	10 perusahaan	10 Perusahaan

❖ **Sasaran 2 :**

Meningkatnya Rasio Elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik

1. Membandingkan Antara target dan realisasi kinerja tahun ini

:

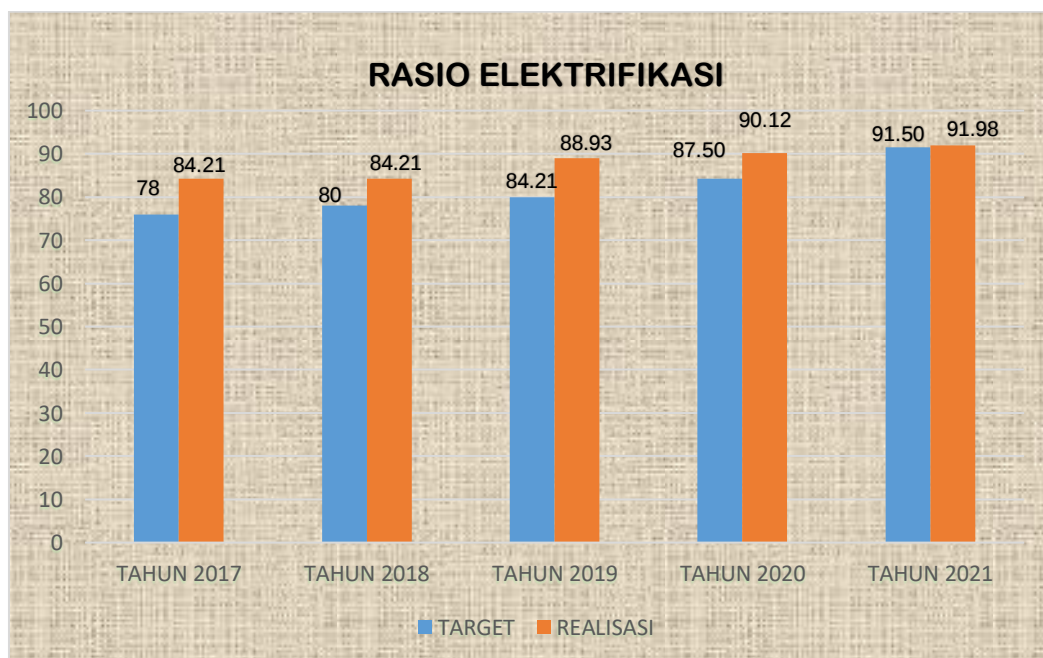
Pengukuran Prosentase Rasio Elektrifikasi dengan hasil analisis capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Rasio Elektrifikasi	%	91,50	91,98	105

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Kinerja (naik/turun)
1.	Persentase Rasio Elektrifikasi	%	84,21	88,93	90,21	91,98	Naik

Capaian kinerja sasaran Tahun 2021 diatas mengalami peningkatan sebesar 91,98 %. perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya capaian kinerja terus mengalami peningkatan dapat dilihat flowchart dibawah ini :



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2023)	Realisasi s/d 2021	Capaian s/d 2021 (%)
1.	Rasio Elektrifikasi	%	95,00	91,98	96,82

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan realiasasi program prioritas sesuai RPJMD yaitu Rasio Elektrifikasi tahun 2021 mengalami peningkatan dari target 91,50 % menjadi 91,98 % faktor – faktor penyebab keberhasilan, kendala dan alternatif solusi adalah :

❖ **Keberhasilan**

- Adanya penambahan di Sisi KK berlistrik PLN yang pada tahun 2021 sebanyak 25 desa terlayani oleh jaringan PT. PLN (Persero)
- Pertumbuhan/penambahan sambungan listrik di wilayah perkotaan atau di wilayah yang sudah exit jaringan PLN. Pertumbuhan pelanggan ini paling besar kontribusinya dalam pertumbuhan jumlah sambungan/pelanggan berlistrik PLN.
- Adanya kegiatan pekerjaan PLTS terpusat di 6 lokasi dengan kontribusi sambungan sebesar 694 sambungan rumah (Non PLN).
- Adanya penambahan sambungan listrik dari program CSR pertambangan.

❖ **Kendala**

- Pandemi Covid 19 yang melanda Provinsi Kalimantan Timur dan diterapkannya PPKM

- Masih terdapat Desa kepulauan yang jauh dari jangkauan listrik PLN
- Letak geografis berupa lokasi desa yang berjauhan dan yang sulit dijangkau melalui jalur transportasi darat dan laut.

❖ Alternatif solusi

- Mendorong Pemerintah Pusat untuk menambah Anggaran untuk pembangunan listrik pedesaan
- Menyiapkan strategi dan Rencana Kerja (RK) dimana diperlukannya data yang akurat dilapangan sehingga jika dibutuhkan akan dilakukan survey bersama baik dinas ESDM Prov.Kaltim maupun PEMDA dan PLN
- Mendorong pemerintah/ peran swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur akses ke desa yang belum terjangkau jaringan PLN.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan dilakukan analisis efiesinsi penggunaan sumberdaya adalah untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian masing-masing sasaran sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Analisis efesiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercepaian 105 % Analisis efesiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efesiensi yang sesungguhnya, pengukuran efesiensi yang sesungguhnya adalah dengan memandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efesiensi.

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
-------------------	-----------	---------------------	-------------------------	---------------

Meningkatnya rasio Elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik	Rasio Elektrifikasi	105	83,32	79,35
--	---------------------	-----	-------	-------

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Dengan 5 kegiatan seperti tabel dibawah ini

Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK berlistrik	1.135.000	1.143.533
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	4 Perusahaan	6 Perusahaan
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50 perusahaan	60 Perusahaan
Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang mendapat rancangan Pergub untuk penetapan tarif tenaga listrik	5 perusahaan	5 perusahaan
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	12 Perusahaan	15 Perusahaan

Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan pedesaan	1 Dokumen	1 Dokumen
---	--	-----------	-----------

❖ **Sasaran 3 :**

Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil

1. Membandingkan Antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

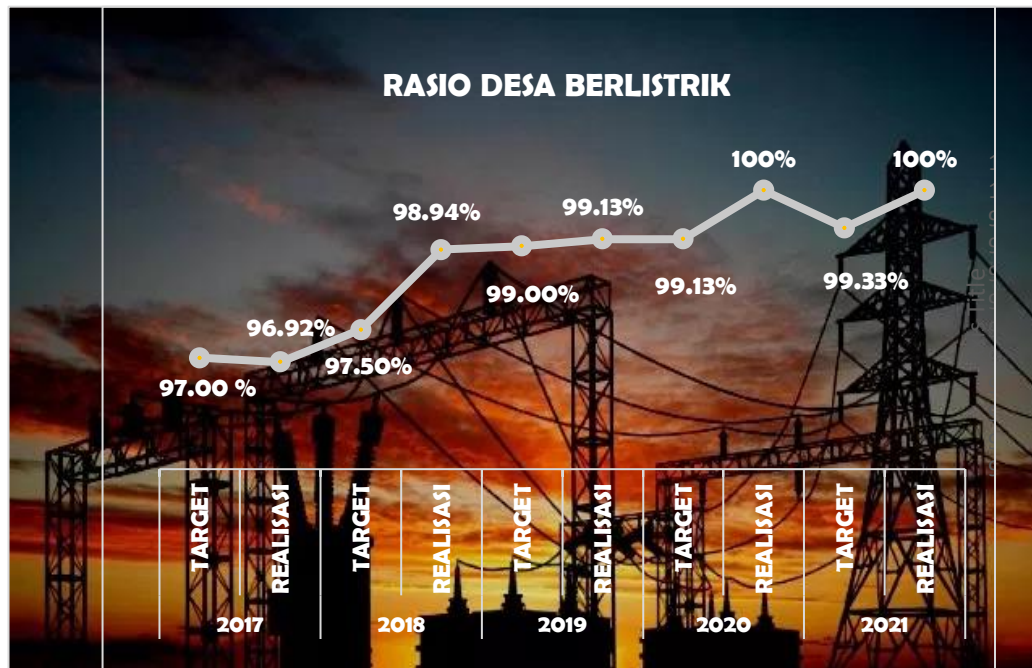
Pengukuran Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil dengan hasil analisis capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio Desa Berlistrik	%	99,33	100	100,67%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Kinerja (naik/turun)
1.	Rasio Desa Berlistrik	%	98,07	99,13	100	100	Stabil

Dibandingkan dengan Tahun 2020 capaian kinerja sasaran Tahun 2021 untuk indikator rasio desa berlistrik mengalami kestabilan untuk hasil sebesar 100 % di karenakan oleh Jumlah Desa/Kelurahan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tidak ada perubahan/penambahan desa sehingga hasilnya tetap sama. Perbandingan dari tahun ke tahun sebelumnya peningkatan capaian kinerja dapat dilihat flowchart dibawah ini :



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2023)	Realisasi s/d 2021	Capaian s/d 2021 (%)
1.	Rasio Desa Berlistrik	%	100	100	100

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan realisasi program prioritas sesuai RPJMD yaitu persentase Rasio Desa Berlistrik tahun 2021 mengalami peningkatan dari target 99,33 % dengan realisasi menjadi 100 %.

❖ Keberhasilan

- Adanya peningkatan penerimaan penyediaan data penggunaan EBT dari Steakholder
- Adanya penambahan Infrastruktur EBT sebagai akibat pembangunan Pembangkit listrik menggunakan EBT di Daerah 3T dalam upaya peningkatan Rasio elektrifikasi.
- Ketersediaan listrik dipedesaan terpencil dan daerah tertinggal hasil prakarsa dan inisiatif local daerah dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

❖ Kendala

- Masih mahalnya biaya infrastruktur EBT karena belum adanya produsen komponen peralatan secara massal sebagai-mana untuk energi konvensional
- Harga jual dari produsen dan harga beli oleh PLN terhadap produk energi terbarukan belum sesuai dengan keekonomian
- Letak geografis yang sulit terjangkau untuk dilalui kendaraan pengangkut material.
- Daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal.

❖ Alternatif Solusi

- Mendorong Pihak Swasta maupun Masyarakat untuk meningkatkan penggunaan EBT dalam rangka memenuhi kebutuhan energi bagi penggunaan sendiri
- Melaksanakan Prog-ram AMET (Aksi Mandiri Energi Baru Terbarukan) Kaltim sebagai upaya untuk mensosialisasikan dan menggerakkan Stakeholder Untuk Aktif menggunakan Teknologi EBT bagi pemenuhan kebutuhan energinya sendiri
- Mengupayakan koordinasi terkait regulasi antara Investor dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian masing-masing sasaran sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 104%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi.

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
<i>Meningkatnya rasio Elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik</i>	Rasio Desa Berlistrik	100,67	81,67	81,12

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 3 (tiga) yaitu Program Pengelolaan Energi Terbarukan. Dengan 4 (empat) kegiatan seperti tabel dibawah ini :

Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	% Pemanfaatan EBT	6,08 %	6,53%
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu)	Jumlah Potensi dan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	4 Kab/kota	4 Kab/Kota

Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ atau ke Arah Perairan Kepulauan	daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ ke Arah Perairan Kepulauan		
Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Potensi dan Pemanfaatan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen
Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 Ton Per Tahun	Jumlah Potensi dan Pemanfaatan Biofuel sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai dengan 10.000 ton Per tahun	1 Dokumen	1 Dokumen
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 SK	1 SK

❖ **Sasaran 4 :*****Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah*****1. Membandingkan Antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

:

Pengukuran Presentase Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan hasil analisis capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	82	82	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Kinerja (naik/turun)
1.	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%				100	Stabil

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2023)	Realisasi s/d 2021	Capaian s/d 2021 (%)
1.	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	82	82

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan realisasi program prioritas sesuai RPJMD yaitu persentase Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021 yaitu dari target 82 % dan realisasi menjadi 82 %.

❖ **Keberhasilan**

- Selama Pandemi adanya pengaturan jam kerja bagi pegawai (WFO dan WFH) dan pelayanan dilaksanakan baik secara offline maupun online melalui media elektronik, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Memaksimalkan Saran dan Prasarana yang tersedia dalam memberikan pelayanan sebagai bentuk eksistensi kelembagaan Perangkat Daerah

❖ **Alternatif Solusi**

- Dengan sarana dan prasarana yang ada mendorong setiap pegawai untuk berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya adalah untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian masing-masing sasaran sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi.

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	100	84,78	84,78

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 4 (empat) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan 8 (delapan) kegiatan seperti tabel dibawah ini :

Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	82 %	82%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 dokumen	6 dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntabel	54 dokumen	54 dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang Diverifikasi	4 Laporan	4 laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	131 Pegawai	131 Pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang Tercapai	12 Bulan	12 Bulan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	33 Unit	33 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Kegiatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Secara Berkala	12 Bulan	12 Bulan

D. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran total belanja keseluruhan pada tahun 2021 sebesar 82,72 % dari total anggaran. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik (secara rata-rata melalui target) dan diikuti dengan penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Realisasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	2,00	2,17	108,50	1.949.999.960	1.430.449.240	73,36
		Persentase Jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	46,63	50,00	107,23	2.225.000.000	1.312.229.362	58,98
2	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Rasio Elektrifikasi	91,50	91,98	100,52	46.921.080.638	39.092.429.018	83,32
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	99,33	100	100,67	2.219.129.000	1.812.325.181	81,67
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	82	100	122	22.164.685.402	18.791.116.082	84,78

i. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan

Tabel 9

Realisasi Anggaran Tahun 2021 per Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%
3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	22.164.685.402	18.791.116.082	84,78
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	932.759.500	752.511.500	80,68
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.485.947.600	14.093.630.807	85,49
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	61.800.000	15.840.000	25,63
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	304.965.000	104.320.000	34,21
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.324.190.902	1.190.501.374	89,90
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	260.500.000	127.226.800	48,81

3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.348.863.400	2.197.539.942	93,56
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.509.000	309.545.659	69,48
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1.949.999.960	1.430.449.240	73,36
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1.549.999.960	1.176.743.542	75,92
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	300.000.000	219.906.700	73,30
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100.000.000	33.798.998	33,80
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	2.225.000.000	1.312.229.362	58,98
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	75.000.000	64.095.500	85,46
3.29.03.1.02	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	400.000.000	367.213.780	91,80
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	355.000.000	221.530.514	62,40
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	410.000.000	99.018.453	24,15
3.29.03.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	350.000.000	188.888.925	53,97
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	575.000.000	336.223.438	58,47
3.29.03.1.08	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 Daerah Provinsi	60.000.000	35.258.752	58,76
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	2.219.129.000	1.812.325.181	81,67
3.29.05.1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ ke Arah Perairan Kepulauan	344.559.000	225.259.566	65,38
3.29.05.1.02	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	344.570.000	223.715.239	64,93
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 Ton Per Tahun	280.000.000	237.604.757	84,86
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1.250.000.000	1.125.745.619	90,06
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	46.921.080.638	39.092.429.018	83,32
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100.000.000	87.418.550	87,42
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	836.000.000	735.815.568	88,02
3.29.06.1.03	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk	50.000.000	44.750.306	89,50

3.29.06.1.05	Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	100.000.000	77.171.000	77,17
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	45.835.080.638	38.147.273.594	83,23
Jumlah		75.479.895.000	62.438.548.883	82,72

BAB IV
PENUTUP**1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan LKJIP ini berdasarkan pada capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya. Secara garis besar dari hasil analisis LKJIP Dinas Energi Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur memperoleh capaian Kinerja 100 %.

Dari hasil pembahasan uraian realisasi dan capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang tertuang di Dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2023, khususnya tahun 2021 terdapat lima Program dan 27 Kegiatan, diantaranya 4 (empat) Sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil analisa 4 (empat) sasaran strategis yang memenuhi target atau dengan katagori *sangat efisien*. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis yaitu **100 %** atau dengan katagori **Sangat Efisien**.
2. Jumlah Dana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dianggarkan untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan strategis dan pendukung/ administratif Tahun 2021 secara keseluruhan yaitu Realisasi Fisik sebesar **96,85 %** dan Realisasi Keuangan sebesar **82,73 %** atau sebesar Rp. 62.446.288.883,- dari jumlah dana Pagu Anggaran yaitu sebesar Rp. 75.479.895.000,- dengan perincian yaitu Belanja Wajib Mengikat dengan Realisasi Fisik sebesar **85,07%** dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 18.791.116.082,- atau **84,78 %**. Belanja Tupoksional Realisasi Fisik sebesar **80,88 %** dan realisasi

keuangan sebesar Rp. 2.742.678.602,- atau sebesar **65,69 %**. Belanja Prioritas Realisasi Fisik sebesar **96,69%** dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.904.754.199,- atau sebesar 83,24%.

3. Adapaun SILPA sebesar Rp. 13.041.346.117,- atau sebesar 17,28% dikarenakan oleh :

1. Secara umum dengan keadaan Pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM yang menyebabkan kegiatan tidak berjalan dengan semestinya, sehingga terjadinya silpa disetiap belanja dan belanja barang dan jasa yang tidak dilaksanakan, seperti :

- Kegiatan konsultasi, koordinasi, pengawasan, verifikasi, dan evaluasi;
- Kegiatan pengadaan baik melalui paket lelang, paket pengadaan langsung maupun paket penunjukkan langsung, yang menyebabkan sisa pada :
 - ✓ Belanja Barang dan Jasa (belanja barang habis pakai, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas, belanja alat/bahan, belanja pemeliharaan, belanja jasa kantor);
 - ✓ Belanja Pegawai (belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja honorarium);
 - ✓ Sisa Belanja Modal (belanja modal dan peralatan mesin)

2. Yang terbesar silpa yang terjadi pada :

- Belanja pegawai yaitu belanja penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 2.392.316.793,-
- Pembangunan PLTS terpusat sebesar Rp. 6.397.233.000,-
- Selebihnya sebesar Rp. 4.243.056.324,- yaitu :
 - ✓ Silpa dari belanja barang dan jasa (belanja barang habis pakai, makan minum, belanja alat/bahan, belanja pemeliharaan, belanja jasa kantor dan perjalanan dinas) dari seluruh program dan kegiatan;
 - ✓ Silpa dari belanja honorarium dari seluruh program dan kegiatan;
 - ✓ Silpa dari belanja modal dan peralatan mesin dari seluruh program dan kegiatan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 khususnya Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan.

2. Saran

Dengan LKJiP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintah yang baik, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan LKJiP tahun 2021 yang ditetapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian LKJiP Tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan penilaian kinerja lebih lanjut.

LKJIP 2021

PENGUKURAN EFISIENSI PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Efesiensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	%	2,00	2,17	108,50	
		Persentase Jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan P`roduksi	%	46,63	50,00	107,22	
Rata – rata capaian Strategis 1						107,86	Sangat Efisien
2	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase Rasio Elektrifikasi	%	91,50	91,98	100,52	
Rata – rata capaian Strategis 2						100,52	Sangat Efisien
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Daerah	Rasio Desa Berlistrik	%	99,33	100	100,67	
Rata – rata capaian Strategis 3						100,67	Sangat Efisien
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	82	82	100	
		Rata- rata capaian Strategis 4				100	Sangat Efisien
Capaian Tahun 2021						102,26	Sangat Efisien

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
BERDASARKAN ANGGARAN
TAHUN 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	%	1.949.999.960	1.430.449.240	73,36
		Persentase Jumlah Perusahaan yang telah Melaksanakan Kegiatan Produksi	%	2.225.000.000	1.312.229.362	58,98
Jumlah				4.174.999.960	2.742.678.602	65,87
2	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase Rasio Elektrifikasi	%	46.921.080.638	39.092.429.018	83,32
Jumlah				46.921.080.638	39.092.429.018	83,31
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi di Daerah Terpencil	Rasio Desa Berlistrik	%	2.219.129.000	1.812.325.181	81,67
Jumlah				2.219.129.000	1.812.325.181	81,66
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	22.164.685.402	18.791.116.082	84,78
Jumlah				22.164.685.402	18.791.116.082	84,78
Total				75.479.895.000	62.438.548.883	82,72

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Timur Sesuai PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						REALISASI				TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
										2019		2020		2021					
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Terpenuhinya kebutuhan energi Daerah		3.05.01.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rasio Elektrifikasi															
	Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik			Persentase Rasio Elektrifikasi															
		3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	945,607	1,011,485	1,655,386,437	1,105,227	1,507,976,221										
		3.05.37.01	Pembangunan Ketenagalistrikan	Penambahan Desa/Kelurahan berlistrik	2 Desa	2 Desa	-	2 Desa	811,199,500								bru, kbr, kkr, km, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd		
		3.05.37.03	Perencanaan Pengembangan kelenagalistrikan	Data Dasar untuk Basic Desain Renc Penyediaan Tenaga	-	2 Laporan	942,599,889	-	-								btg, kbr, kkr, km, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd		
		3.05.37.04	Survey, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pengembangan	Jumlah movev pengembangan/pembangunan infrastruktur kelenagalistrikan	-	20 Lokasi	420,534,945	-	-								bru, kbr, kkr, km, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd		
		3.05.37.05	Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keekonomian yang baik	-	25 Perusahaan	292,251,603	-	-								bru, kbr, kkr, km, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd		
		3.05.37.06	Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan	Jumlah perus yang mendapat Rekomendasi teknis	25 Perusahaan	40 Perusahaan	-	45 Perusahaan	367,879,121								bru, kbr, kkr, km, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd		
		3.05.37.07	Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	Jumlah perus yang menerapkan Keselamatan	20 Perusahaan	30 Perusahaan	-	40 Perusahaan	328,897,600								bru, kbr, kkr, km, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd		

LKJIP 2021

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						REALISASI				TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						2019		2020		2021		2022		2023					
R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan																			
	Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik	3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	1135000 KK	-	-	-	-	1135000 KK	46.921.080.638	1165000 KK	54.200.364.300	1200000 KK	54.220.087.800	1200000 KK	54.220.087.800	DESDM	Kaltim
		3.29.06.1.01	Penatusahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yangmendapat rekomendasi teknis izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	40 Perusahaan/Badan Usaha	-	-	-	-	40 Perusahaan/badan usaha	100.000.000	15 Perusahaan	350.000.000	20 Perusahaan	300.000.000	20 Perusahaan	300.000.000	DESDM	Kaltim
		3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	40 Perusahaan/badan usaha	-	-	-	-	40 Perusahaan/badan usaha	100.000.000	15 Perusahaan	350.000.000	20 Perusahaan	300.000.000	20 Perusahaan	300.000.000	DESDM	Kaltim
		3.29.06.1.02	Penatusahaan Izin Operasinya yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yangmendapat rekomendasi teknis izin Operasi (IO)	50 Perusahaan/Badan Usaha	-	-	-	-	50 Perusahaan/badan usaha	836.000.000	15 Perusahaan	800.000.000	50 Perusahaan	800.000.000	60 Perusahaan	851.527.800.00	DESDM	Kaltim
		3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang telah memahami aturan dan SOP Ketenagalistrikan	50 Perusahaan/badan usaha	-	-	-	-	50 Perusahaan/badan usaha	300.000.000	15 Perusahaan	150.000.000					DESDM	Kaltim
		3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat Rekomendasi teknis izin operasi (IO)	50 Perusahaan/badan usaha	-	-	-	-	50 Perusahaan/badan usaha	200.000.000	15 Perusahaan	150.000.000	50 Perusahaan	300.000.000	50 Perusahaan	300.000.000	DESDM	Kaltim

LKJIP 2021

		3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Ketenagalistrikan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	50 Perusahaan/badan usaha	-	-	-	-	50 Perusahaan/badan usaha	336.000.000	140 Objek Pembangkit	500.000.000	50 Perusahaan	300.000.000	50 Perusahaan	300.000.000	DESDM	Kaltim
--	--	-----------------	---	--	---------------------------	---	---	---	---	---------------------------	-------------	----------------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------	--------

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERAN KAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	LOKASI
						REALISASI				TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						2019		2020		2021		2022		2023					
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3.29.06.1.03	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumenten Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang mendapat rancangan PerGub untuk penetapan tarif tenaga listrik	5 Perusahaan	-	-	-	-	5 Perusahaan	50.000.000	-	50.000.000.00	-	50.000.000.00	-	50.000.000.00	DESDM	Kaltim
		3.29.06.1.03.02	Penentuan dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan tarif tenaga listrik	5 Perusahaan	-	-	-	-	5 Perusahaan	50.000.000	-	50.000.000.00	-	50.000.000.00	-	50.000.000.00	DESDM	Kaltim
		3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya oleh Penanam Miodal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapatkan rekomendasi teknis izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	12 Perusahaan/Badan Uaha	-	-	-	-	12 Perusahaan/Badan Usaha	100.000.000	12 Perusahaan	50.000.000.00	-	300.000.000	-	300.000.000	DESDM	Kaltim
		3.29.06.1.05.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan pemegang IUJPTL	12 Perusahaan/Badan Uaha	-	-	-	-	12 Perusahaan/Badan Usaha	50.000.000	12 Perusahaan/Badan Uaha	50.000.000	-	-	-	-	DESDM	Kaltim
		3.29.06.1.05.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis IUJPTL	12 Perusahaan/Badan Uaha	-	-	-	-	12 Perusahaan/Badan Usaha	50.000.000	-	-	-	300.000.000	-	300.000.000	DESDM	Kaltim

LKJIP 2021

		3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah data verifikasi kategori masyarakat tidak mampu daerah terpencil dan perdesaan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	45.835.080.638	1 Dokumen	53.000.364.300	1 Dokumen	52.820.087.800	1 Dokumen	52.820.087.800	DESDM	Kaltim
		3.29.06.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah rumah belum berlistrik di sekitar jaringan listrik PLN yang berhasil disambungkan listriknya	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	414.000.000	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	840.000.000	1 Dokumen	840.000.000	DESDM	Kaltim

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						REALISASI				TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						2019		2020		2021		2022		2023							
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	474.000.000	1 Dokumen	409.864.500	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	226.000.000	1 Laporan	160.135.500	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS dan Jaringan Distribusi Listrik	6 Lokasi	-	-	-	-	6 Lokasi	44.721.080.638	8 Lokasi	51.830.364.300	6 Lokasi	51.180.087.800	6 Lokasi	51.180.087.800	DESDM	Kaltim		
	Terpenuhinya kebutuhan Energi di daerah terpencil			Rasio Desa Berlistrik	98,94%	99,13%	2,057,720,316	99,13%	21,840,311,176												
		3.05.47	Program Diversifikasi dan Konservasi Energi	% Pemanfaatan EBT	3,81%	4,48	-	4,82%	21,840,311,176												
		3.05.47.01	Pengembangan dan pemanfaatan Bioenergi	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	31 Rumah	-	-	80 Rumah	1,169,669,578										bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd		
		3.05.47.02	Pengembangan dan Pemanfaatan Aneka Energi	Desa yang dialiri listrik Energi Terbarukan	4 Desa	-	-	6 Desa	20,419,168,910										bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd		
		3.05.47.03	Konservasi Energi dan Air	Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air	-	20 Instansi	-	23 Instansi	251.472.688										bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd		

LKJIP 2021

				Jumlah Penyalur BBM	-	50 Penyalur	-	50 Penyalur										
				Jumlah Penyalur LPGsubsid	-	50 Penyalur	-	50 Penyalur										
		3.05.27	Program Diversifikasi Energi	% Pemanfaatan EBT		0.50%	2,057,720,316	-	-									
		3.05.27.01	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Jumlah DED PLTS Terpusat		8 DED	1,401,218,601	-	-									kbr, kkr, mah, smd

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						REALISASI				TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						2019		2020		2021		2022		2023							
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3.05.27.02	Pengembangan Bioenergi	Jumlah Potensi pengembangan instalasi biogas skala Jumlah Perusahaan dengan potensi energi berbasis POME Jumlah penyalur BBMbersubsidi Jumlah penyalur LPG bersubsidi		50 Rumah 5 Perusahaan 50 Penyalur 50 Penyalur	363.476.025 	- - -	- 										bru, smd		
		3.05.27.03	Monitoring Penggunaan energi listrik dan air	Jumlah OPD yang hemat listrik dan air		2 Laporan	293.025.690	-	-										ktrn, smd		
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasarnya yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahannya	Terpenuhinya kebutuhan Energi di Daerah Terpencil	3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Pemanfaatan EBT	6.08 %	-	-	-	-	6.08 %	2.219.129.000.00	7.34 %	2.920.731.000.00	8.40 %	3.160.127.332.00	8.40 %	3.160.127.332.00	DESDM	Kaltim		
		3.29.05.1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan LangsungPanas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	344.559.000	1 Dokumen	676.375.000	1 Dokumen	722.245.000	1 Dokumen	822.245.000.00	DESDM	Kaltim		

LKJIP 2021

		3.29.05.1.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	47.960.000	-	-	-	-	1 Dokumen	47.960.000	DESDM	Kaltim
--	--	-----------------	---	---	-----------	---	---	---	---	-----------	------------	---	---	---	---	-----------	------------	-------	--------

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						REALISASI				TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						2019		2020		2021		2022		2023							
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3.29.05.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kajian awal potensi pemanfaatan langsung panas bumi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	48.284.000	1 Dokumen	597.690.000	1 Dokumen	722.245.000	1 Dokumen	722.245.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.05.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Inventarisasi Potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	4 Kab/Kota	-	-	-	-	4 Kab/Kota	248.315.000	4 Kab/Kota	78.685.000	-	-	4 Kab/Kota	78.685.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.05.1.02	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah potensi dan pemanfaatan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 Daerah Provinsi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	344.570.000	-	-	-	-	1 Dkumen	344.570.000-	DESDM	Kaltim		
		3.29.05.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Prosedur dan Persyaratan SKT IJUP dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	48.054.000	-	-	-	-	1 Dokumen	48.054.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.05.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	48.096.000	-	-	-	-	1 Dokumen	48.096.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.05.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SKT IJUP dalam Daerah yang dikendalikan dan diawasi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	248.420.000	-	-	-	-	1 Dokumen	248.420.000	DESDM	Kaltim		

LKJIP 2021

		3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	280.000.000	1 Sitem Aplikasi	592.696.000	1 Dokumen	717.396.000	1 Dokumen	700.000.000.00	DESDM	Kaltim
		3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.	Sistem Informasi Potensi dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1 Dokumen/1 Sitem Aplikasi	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Sitem Aplikasi	377.650.000	-	-	1 Sitem Aplikasi	377.650.000	DESDM	Kaltim

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						REALISASI				TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						2019		2020		2021		2022		2023							
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3.29.05.1.03.03	Pembinaan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per tahun	1 Dokumen/1 Sistem	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Sistem	215.046.000	1 Dokumen	717.396.000	1 Dokumen	717.396.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per tahun yang dikendalikan dan diawasi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	280.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	280.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1 SK	-	-	-	-	1 SK	1.250.000.000	1 SK	1.651.660.000	1 SK	1.720.486.332	1 SK	1.637.882.332.00	DESDM	Kaltim		
		3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	SOP pelaksanaan konservasi energi/Jumlah Sosialisasi	1 SOP	-	-	-	-	1 SOP	100.000.000	1 Kegiatan	71.560.000	1 Dokumen	62.500.000	1 Dokumen	62.500.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.05.1.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Penghematan Energi dan Air pada Usia Dini/Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	100.000.000	14 Orang	38.000.000	-	-	14 Orang	38.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Sosialisasi penghematan energi pada pengelola gedung Pemerintah/Sosialisasi Konservasi Energi Kepada Masyarakat	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	100.000.000	5 Kegiatan	109.400.000	1 Dokumen	193.710.000	1 Dokumen	193.710.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	30 Unit	-	-	-	-	30 Unit	770.000.000	40 Unit	1.150.500.000	50 Unit	1.180.276.332	1 Dkumen	700.000.000.00	DESDM	Kaltim		
		3.29.05.1.04.06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Pengelolaan Pelaksanaan Konservasi Energi/Pelaksanaan Bimbingan Teknis Konservasi Energi	50 Peserta	-	-	-	-	50 Peserta	80.000.000	50 Peserta	87.800.000	1 Kegiatan	102.000.000	1 Kegiatan	102.000.000	DESDM	Kaltim		

LKJIP 2021

		3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	- Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air - Jumlah Penyalur LPG subsidi - Jumlah Penyalur BBM	10 Instansi 50 Penyalur 50 Penyalur	-	-	-	-	10 Instansi 50 Penyalur 50 Penyalur	100.000.000	10 Instansi 50 Penyalur 50 Penyalur	194.400.000	3 Kegiatan	182.000.000	3 Kegiatan	182.000.000	DESDM	Kaltim
	Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan			Jumlah sumber daya dan cadangan mineral dan batubara	62.92 Milyar Ton	63.74 Milyar Ton	2,318,374,332	64.24 Milyar Ton	876,205,829										
		3.05.45	Program Pengembangan Sumberdaya Geologidan Tata Lingkungan	Persentase perusahaan yang mengikuti kaidah perhitungan sumberdaya dan cadangan	60%	-	-	67%	876,205,829										

LKJIP 2021

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						REALISASI				TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						2019		2020		2021		2022		2023							
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3.05.45.01	Pemetaan dan perhitungan Sumberdaya Geologi	Jumlah Inventerisasi dan verifikasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara,	335 Perusahaan	335 Perusahaan	-	425 Perusahaan	314,749.927										bru, kkr, ktm, ppu, bpn		
		3.05.45.02	Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	- Jumlah Rekom - Jumlah sumur yang diawasi	120 Rekom 100 Sumur	125 Rekom 100 Sumur	-	130 Rekom 120 Sumur	274.378.478										bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd		
		3.05.45.03	Pengawasan Mutu dan Muka Air Tanah	- Data mutu/muka air tanah - Sumur pantau - Peta zona konservasi air tanah	10 Kab/Kota 0 0	10 Kab/Kota 0 1 CAT	-	10 Kab/Kota 2 Sumur 2 CAT	287.077.424										bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd		
		3.05.39	Program Pengembangan Air Tanah	Persentase pemanfaatan potensi air tanah	2%	3%	1,097,308,282	-	-												
		3.05.39.01	Konservasi Air Tanah	Jumlah peta konservasi air tanah CAT		1 Peta	662.936.885	-	-										bpn, btg, smd		
		3.05.39.02	Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air tanah	133 Rekom	150 Rekom	434,371.397	-	-										bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd		
		3.05.43	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi	Peningkatan nilai tambah data sumberdaya mineral dan batubara	0	95%	1,221,066,050	-	-												
		3.05.43.01	Pemetaan sumberdaya Geologi	Data Lifting Peta Geologi Tematik	-	4 Triwulan 4 Peta	886.810.000	-	-										bru, kbr, kkr, ktm, ppu, smd		
		3.05.43.02	Neraca Sumberdaya dan Cadangan Batubara	Data dan informasi Tekno ekonomi sumberdaya dan	-	7 kab/kota	334.256.050	-	-										bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, smd		
	Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang ditetapkan	33.00 %	-	-	-	-	33.00 %	1.949.999.960	33.54 %	1.713.862.000	38.38%	2.443.862.000	38.38%	2.443.862.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1.549.999.960	1 Dokumen	1.348.862.000	1 Dokumen	2.043.862.000	1 Dokumen	2.043.862.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah titik pengambilan data	33 Kecamatan	-	-	-	-	33 Kecamatan	689.999.960	5 Kecamatan	517.600.000	33 Kecamatan	917.600.000	33 Kecamatan	917.600.000	DESDM	Kaltim		

LKJIP 2021

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						REALISASI				TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						2019		2020		2021		2022		2023							
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah zonasi dalam cekungan air tanah potensi dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batuan/Jumlah CAT yang di Evaluasi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	800.000.000	1 CAT	87.400.000	1 Dokumen	82.400.000	1 Dokumen	82.400.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah pembangunan sumur produksi/pantau/resapan yang diawasi	1 Dokumen	-	-	-	-	4 Sumur	60.000.000	1 Dokumen	743.862.000	1 Dokumen	1.043.862.000	1 Dokumen	1.043.862.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	122 Perusahaan	-	-	-	-	122 Perusahaan	300.000.000	120 Perusahaan	325.000.000	120 Perusahaan	500.000.000	120 Perusahaan	500.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.02.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah SOP perizinan air tanah	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	25.000.000	-	-	-	-	3 Dokumen	25.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan Air Tanah	140 Rekomtek	-	-	-	-	140 Rekomtek	175.000.000	100 Rekomtek	150.000.000	100 Rekomtek	1750.000.000	100 Rekomtek	1750.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Perizinan Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah pelaksanaan perizinan air tanah yang dikendalikan dan diawasi	100 Surat Izin	-	-	-	-	100 Surat Izin	100.000.000	100 Perusahaan	175.000.000	120 Perusahaan	325.000.000	120 Perusahaan	325.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Aturan terkait Nilai Perolehan Air Tanah	1 SK	-	-	-	-	1 SK	100.000.000	1 SK	40.000.000	1 SK	125.000.000.00	1 SK	125.000.000.00	DESDM	Kaltim		
		3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah data dan Informasi NPA Kabupaten/Kota yang terkumpul dan diolah	5 Kab/Kota	-	-	-	-	5 Kab/Kota	50.000.000	10 Kab/Kota	40.000.000	1 Data	25.000.000	1 Data	25.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	-	-	-	-	10 Kab/Kota	25.000.000	-	-	-	-	10 Kab/Kota	25.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.02.1.03.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah perusahaan Pemakaian air Tanah yang dikendalikan dan diawasi	100 Perusahaan/wajib pajak	-	-	-	-	100 Perusahaan/wajib pajak	25.000.000	-	-	100 Perusahaan	100.000.000	100 Perusahaan	100.000.000	DESDM	Kaltim		

LKJIP 2021

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						REALISASI				TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						2019		2020		2021		2022		2023							
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertambangan	-	1,61 Juta Ton CO2eq	3,313,305,449	244 Juta Ton CO2eq	1,739,141,569												
		3.05.46	Program Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB	38 Perusahaan	-	-	45 Perusahaan	1,739,141,569												
		3.05.46.01	Pembinaan dan Pengawasan Teknis Minerba	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan	50 Perusahaan	55 Perusahaan	-	65 Perusahaan	656,317,540										bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd		
		3.05.46.02	Pembinaan dan Pengawasan perusahaan minerba	Jumlah perusahaan CrC yang menerapkan efisiensi bahan bakar dan penggunaan biodiesel 20 %	0	29 Perusahaan	-	35 Perusahaan	431,654,620										bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd		
		3.05.46.03	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Minerba	Jumlah perusahaan yang memenuhi kewajiban pembayaran	71 Perusahaan	75 Perusahaan	-	80 Perusahaan	651,169,409										bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd		
		3.05.41	Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang	Persentase wilayah pertambangan yang direhabilitasi	54.04%	55%	155,129,800	-	-												
		3.05.41.01	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Reklamasi	Luas Lahan yang direklamasi	18,838.62 Ha	190 Ha	155,129,800	-	-										bru, smd		
		3.05.42	Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan	Jumlah Perusahaan yang berkualitas	75 Perusahaan	80 Perusahaan	3,158,175,649	-	-												
		3.05.42.01	Evaluasi dan Monitoring Kinerja Teknis Pertambangan	Jumlah penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang	-	100 Milyar	641,600,920	-	-										bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, smd		
		3.05.42.02	Pembinaan dan pendataan hasil produksi Mineral dan	Produksi Batubara	250 Juta Ton	240 Juta Ton	1,075,733,129	-	-										bru, kbr, kkr, ktm, smd		
		3.05.42.03	Pemantauan Perijinan Pertambangan	Jumlah Perusahaan Non CNC yang dipantau	150 Perusahaan	150 Perusahaan	307,871,000	-	-										bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, btg, smd		
		3.05.42.04	Penggunaan Efisiensi biodiesel pada perusahaan tambang	Jumlah Perusahaan Pengguna Biodiesel 20%	-	29 Perusahaan	499,022,500	-	-										bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, smd		

LKJIP 2021

		3.05.42.05	Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	Ketatan perusahaan dalam melaksanakan K3, pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan Teknis Pertambangan	-	60 Perusahaan	633,948,100	-	-									bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, smd
--	--	------------	--	---	---	---------------	-------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						REALISASI				TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						2019		2020		2021		2022		2023							
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	35%	-	-	-	-	35%	2.225.000.000	50%	2.503.970.000	50 %	1.413.720.008	50%	1.413.720.008	DESDM	Kaltim		
		3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 WIUP	-	-	-	-	1 WIUP	75.000.000	1 WIUP	115.000.000	1 WIUP	100.000.000	1 WIUP	100.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Data dan Informasi Penetapan WIUP	9 kab/Kota	-	-	-	-	9 kab/Kota	25.000.000	9 kab/Kota	45.000.000	-	-	9 kab/Kota	45.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Data dan Informasi Pemanfaatan WIUP	9 kab/Kota	-	-	-	-	9 kab/Kota	50.000.000	9 kab/Kota	70.000.000	9 kab/Kota	100.000.000	9 kab/Kota	100.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.03.1.02	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	486.200.000	3 Dokumen	342.960.000	3 Dokumen	140.000.000.00	DESDM	Kaltim		
		3.29.03.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah perusahaan yang menerapkan efisiensi bahan bakar dan penggunaan biodiesel 20%	20 Perusahaan	-	-	-	-	20 Perusahaan	30.000.000	8 Perusahaan	46.200.000	-	-	8 Perusahaan	46.200.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.03.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	30 IUP	-	-	-	-	30 IUP	70.000.000	15 IUP	90.000.000	15 IUP	100.000.000	15 IUP	100.000.000	DESDM	Kaltim		

LKJIP 2021

		3.29.03.1.02.04	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah pengawasan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik	50 Perusahaan	-	-	-	-	50 Perusahaan	300.000.000	55 Perusahaan	350.000.000	16 Perusahaan	242.960.000	16 Perusahaan	242.960.000	DESDM	Kaltim
		3.29.03.1.03	Penatuesahan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	355.000.000	3 Dokumen	490.400.000.00	3 Dokumen	340.240.000	3 Dokumen	340.240.000	DESDM	Kaltim

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						REALISASI				TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						2019		2020		2021		2022		2023							
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3.29.03.1.03.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Data dan Informasi Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	46.200.000	-	-	1 Dokumen	46.200.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	150 IUP	-	-	-	-	150 IUP	75.000.000	25 IUP	94.200.000	25 IUP	100.000.000	25 IUP	100.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.03.1.03.05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah pengawasan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik	50 Perusahaan	-	-	-	-	50 Perusahaan	250.000.000	65 Perusahaan	350.000.000	16 Perusahaan	240.400.000	16 Perusahaan	240.400.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.03.1.04	Penatuesahan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	410.000.000	4 Dokumen	457.620.000	4 Dokumen	116.800.000	4 Dokumen	116.800.000	DESDM	Kaltim		

LKJIP 2021

		3.29.03.1.04.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Tersedianya Data dan Informasi Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	59.020.000	-	-	1 Dokumen	59.020.000	DESDM	Kaltim
		3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Data dan Informasi Wilayah Pertambangan Rakyat dalam daerah provinsi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	48.600.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	DESDM	Kaltim
		3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah pengawasan perusahaan yang mengukuti kaidah pertambangan yang baik	2 Kab/Kota	-	-	-	-	2 Kab/Kota	100.000.000	4 Kab/Kota	350.000.000	14 Perusahaan	16.800.000	14 Perusahaan	16.800.000	DESDM	Kaltim
		3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Luas lahan yang direklamasi dan revegetasi	1 Ha	-	-	-	-	1 Ha	200.000.000	-	-	-	-	1 Ha	200.000.000	DESDM	Kaltim

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						REALISASI				TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						2019		2020		2021		2022		2023							
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3.29.03.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Khusus Untuk Pengelolaan dan pemurnian	Perusahaan	-	-	-	-	Perusahaan	350.000.000	20 Perusahaan	483.750.000	20 Perusahaan	163.720.000	20 Perusahaan	664.750.000.00	DESDM	Kaltim		
		3.29.03.1.05.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Tersedianya Data dan Informasi Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.03.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Jumlah Perusahaan yang diawasi	20 Perusahaan	-	-	-	-	20 Perusahaan	300.000.000	20 Perusahaan	483.750.000	20 Perusahaan	163.720.000	20 Perusahaan	163.720.000	DESDM	Kaltim		
		3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	9 Kab/Kota	-	-	-	-	9 Kab/Kota	575.000.000	10 Kab/Kota	471.000.000	10 Kab/Kota	350.000.000	10 Kab/Kota	600.000.000.00	DESDM	Kaltim		
		3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tersedianya Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	9 Kab/Kota	-	-	-	-	9 Kab/Kota	200.000.000	10 Kab/Kota	131.000.000	10 Kab/Kota	125.000.000	10 Kab/Kota	125.000.000	DESDM	Kaltim		

LKJIP 2021

		3.29.03.1.07.02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	SK Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	12 SK	-	-	-	-	12 SK	175.000.000	1 SK	149.000.000	1 SK	125.000.000	1 SK	125.000.000	DESDM	Kaltim
		3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Jumlah Perusahaan yang menerapkan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	50 Perusahaan	-	-	-	-	50 Perusahaan	200.000.000	20 Perusahaan	191.000.000	20 Perusahaan	100.000.000	20 Perusahaan	100.000.000	DESDM	Kaltim
		3.29.03.1.08	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan OPK untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha pertambangan Operasi produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka PMDN	10 Perusahaan	-	-	-	-	10 Perusahaan	60.000.000	-	-	-	-	10 Perusahaan	60.000.000	DESDM	Kaltim
		3.29.03.1.08.01	Pengelolaan dan Pengendalian Penjualan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan	Jumlah Perusahaan yang diawasi	10 Perusahaan	-	-	-	-	10 Perusahaan	60.000.000	-	-	-	-	10 Perusahaan	60.000.000	DESDM	Kaltim

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						REALISASI				TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						2019		2020		2021		2022		2023					
						R	Rp	R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi			Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100.00%	100.00%	9,880,558,000	100.00%	6,801,586,567										
		3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	2,998,790,000	85%	3,474,597,418										
		3.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkanbran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi	12	12	2,998,790,000	12	3,474,597,418										Samarinda
		3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0	5	4,046,093,000	5	1,297,582,208										
		3.05.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantr	12 Unit	16 Unit	3,380,179,000	5 unit	727,060,700										smd
		3.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana	100 unit	100 unit	665,914,000	100 Unit	570,521,508										smd
		3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	80%	1,365,125,000	85%	594,503,584										

LKJIP 2021

		3.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Jumlah Kegiatan rapat konsultasi keluar daerah Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam	11 16	12 24	1,118,125,000	12 26	557,746,851									bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bti, smd, luar prov
		3.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0	25	247,000,000	30	36,756,733									bpn, smd, luarPrv
		3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65.68	67.00	1,470,550,000	68	1,434,903,357									
		3.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	8 Dokumen	8 Dokumen	604,550,000	8 Dokumen	582,728,563									bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, bti, smd, luarPrv
		3.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan	5 Laporan	6 Laporan	866,000,000	9 Laporan	852,174,794									bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd, luarPrv

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						REALISASI				TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
										2019		2020		2021		2022					
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			T	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		82 %	-	-	-	-	82 %	22.164.685.402	83 %	23.329.632.700	84 %	23.430.762.860	84 %	23.430.762.860	DESDM	Samarinda/Kalim		
		3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen	932.759.500	6 Dokumen	1.800.000.000	6 Dokumen	1800.000.000.00	6 Dokumen	1800.000.000.00	DESDM	Samarinda/Kalim		
		3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	650.000.000	DESDM	Kalim		
		3.29.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	29.275.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	DESDM	Kalim		
		3.29.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	28.312.500	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	DESDM	Kalim		
		3.29.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	49.939.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	DESDM	Kalim		
		3.29.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	25.983.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	DESDM	Kalim		
		3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	49.250.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	DESDM	Kalim		

LKJIP 2021

		3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	18 Lokasi	-	-	-	-	18 Lokasi	500.000.000	18 Laporan	1.050.000.000	18 Laporan	1.050.000.000	18 Laporan	1.050.000.000	DESDM	Kaltim
		3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntabel	66 Dokumen	-	-	-	-	66 Dokumen	16.485.947.600	84 Dokumen	16.233.654.398	12 Laporan	16.200.000.000	12 Laporan	16.200.000.000	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	54 Dokumen	-	-	-	-	54 Dokumen	15.479.895.000	54 Dokumen	15.629.632.700	12 Laporan	15.600.000.000	12 Laporan	15.600.000.000	DESDM	Kaltim
		3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	1.006.052.600	24 Dokumen	604.021.698	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	600.000.000	DESDM	Kaltim
		3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi BMD yang diverifikasi	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	15.840.000.00	4 Laporan	61.800.000.00	4 Laporan	61.800.000.00	4 Laporan	61.800.000.00	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan bulanan administrasi BMD yang diverifikasi	4 Laporan					4 Laporan	61.800.000	4 Laporan	61.800.000	4 Laporan	61.800.000	4 Laporan	61.800.000	DESDM	Kaltim
		3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	131 Pegawai	-	-	-	-	131 Pegawai	304.965.000	146 Pegawai n	523.380.000	146 Pegawai	304.965.000	146 Pegawai	304.965.000	DESDM	Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						REALISASI				TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						2019		2020		2021		2022		2023							
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atributnya	130 Stel	-	-	-	-	130 Stel	104.965.000	227 Stel	173.380.000	227 Stel	104.965.000	227 Stel	1.624.190.902.00	DESDM	Samarinda		
		3.29.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	35 ASN	-	-	-	-	35 ASN	200.000.000	60 ASN	350.000.000	60 ASN	200.000.000	60 ASN	80.000.000.00	DESDM	Samarinda		
		3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	1.324.190.902	12 Bulan	1.546.011.860	12 Bulan	1.548.486.860	12 Bulan	1.548.486.860	DESDM	Samarinda		
		3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	32.525.000	11 Jenis	32.525.000	11 Jenis	35.000.000	11 Jenis	35.000.000	DESDM	Samarinda		
		3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	77.878.860	45 Jenis	77.878.860	45 Jenis	77.878.860	45 Jenis	77.878.860	DESDM	Samarinda		
		3.29.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	14.927.300	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	DESDM	Samarinda		
		3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	24.969.742	120 Eksemplar	30.568.000	120 Eksemplar	230.568.000	120 Eksemplar	230.568.000	DESDM	Samarinda		

LKJIP 2021

		3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	144 Eksemplar	-	-	-	-	144 Eksemplar	23.040.000	144 Eksemplar	23.040.000	144 Eksemplar	23.040.000	144 Eksemplar	23.040.000	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	4.000.000	6 Tabung APAR	6.000.000	6 Tabung APAR	6.000.000	6 Tabung APAR	6.000.000	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	4140 Kotak	-	-	-	-	4140 Kotak	106.000.000	4140 Kotak	106.000.000	4140 Kotak	106.000.000	4140 Kotak	106.000.000	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	1000.000.000	60 Laporan	1.250.000.000	60 Laporan	1.250.000.000	60 Laporan	1.250.000.000	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang tertata	550 Dokumen	-	-	-	-	550 Dokumen	40.850.000	-	-	-	-	550 Dokumen	40.850.000	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	33 Unit	-	-	-	-	33 Unit	260.650.000	42 Unit	260.650.000	54 Unit	260.650.000	54 Unit	260.650.000	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	76.400.000	42 Unit	76.400.000	54 Unit	76.400.000	54 Unit	76.400.000	DESDM	Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						REALISASI				TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						2019		2020		2021		2022		2023					
						R	Rp	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3.29.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	184.250.000	42 Unit	184.250.000	54 Unit	184.250.000	54 Unit	184.250.000	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa kegiatan kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	2.348.863.400	12 Bulan	2.360.763.400	12 Bulan	2.486.487.958	12 Bulan	2.486.487.958	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	5000 Surat	-	-	-	-	5000 Surat	11.700.000	60000 Surat	23.600.000	12 Bulan	23.600.000	12 Bulan	23.600.000	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	279.207.400	12 Bulan	279.207.400	12 Bulan	279.207.400	12 Bulan	279.207.400	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	2.057.956.000	12 Bulan	2.057.956.000	12 Bulan	2.183.680.558	12 Bulan	2.183.680.558	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	445.509.000	12 Bulan	543.373.042	12 Bulan	543.373.042	12 Bulan	543.373.042	DESDM	Samarinda

LKJIP 2021

		3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	290.404.000	35 Unit	290.409.000	39 Unit	290.409.000	39 Unit	290.409.000	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70 Unit	-	-	-	-	70 Unit	109.505.000	35 Unit	109.505.000	85 Unit	109.505.000	85 Unit	109.505.000	DESDM	Samarinda
		3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	45.600.000	12 Bulan	143.459.042	35 Unit	143.459.042	35 Unit	143.459.042	DESDM	Samarinda